## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

(Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memeroleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya

> TEVI ANA DEWI NIM. 155030107111046



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MALANG

2019

## MOTTO

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik – baiknya penolong. (Q-S Al-Imron : 173)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh

Pusat Layanan Usaha Terpadu

(Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten

Tulungagung)

Disusun oleh : Tevi Ana Dewi

NIM : 155030107111046

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 30 September 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si

NIP. 197108282006041001

<u>Drs. Romula Adiono, M.AP</u> NIP. 196204011987031003

## TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Selasa

**Tanggal** 

: 12 November 2019

Jam

: 09.00 - 10.00 WIB

Skripsi atas nama

: Tevi Ana Dewi

Judul

: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh Pusat

Layanan Usaha Terpadu (Studi pada Pusat Layanan Usaha

Terpadu Kabupaten Tulungagung)

## DAN DINYATAKAN LULUS

**MAJELIS PENGUJI** 

Ketua

Anggota

Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si

NIP. 197108282006041001

Drs. Romula Adiono, M.AP NIP. 196204011987031003

Anggota

Anggota

gus Suryono, M.S

NIP. 195212291979031003

Asti Amelia Novita, S.AP, M.AP., Ph.D 198511102010122006

iii



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## FAKULTAS ILMUADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp.: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax: +62-341-558227 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) (Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpdu kabupaten Tulungagung)" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 1 Oktober 2019

LC437AFF964128F95

Tevi Ana Dewi NIM. 155030107111046

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini peneliti mempersembahkan karya tulis ini kepada orang tua tercinta yaitu Ibu Surjanti, Bapak Muharsono dan kakak tersayang Yunita Intan Hapsari yang tiada hentinya memberi dukungan dan doa kepada peneliti dan setia menemani proses pengerjaan skripsi sampai selesai.



Tevi Ana Dewi. 2019. **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) (Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. Mohammad Nuh, S.IP,. M.Si dan Drs. Romula Adiono, M.AP. 151 halaman

## **RINGKASAN**

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk di berdayakan, karena masih banyak terjadi masalah dan kendala didalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang gencar dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satu caranya adalah membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). PLUT merupakan Lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh yang berhungan dengn UMKM guna untuk meningkatkan kinerja produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan pengembangan sumber daya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Tulungagung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan. Fokus penelitian ini adalah pendekatan pemberdayaan, peran aktor pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan serta faktor pendukung serta faktor penghambat pemberdayaan UMKM. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis Miles Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, semakin banyaknya UMKM yang bergabung dengan PLUT dan semakin berkembang sumber daya manusia pengelola UMKM. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, misalnya adalah memberikan pendampingan dalam bidang produksi, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan juga SDM. Peran pemerintah, swasta dan masyarakat juga dijalankan dengan baik, pemerintah sebagai penyedia layanan pemberdayaan, swasta ikut serta membantu keberhasilan pemberdayaan dan masyarakat sebagai objek yang di berdayakan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Dewi, Tevi Ana, 2019. Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises By the Integrated Business Service Center (Study at the Tulungagung Integrated Business Service Center). Departement of Public Administration. Faculty of Administrative Sciences. Brawijaya University. Supervisor: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si and Drs. Romula Adiono, M.AP. page 151

## **SUMMARY**

Empowerment is an effort made to develop the abilities, skills and independence of individuals or communities in order to meet their needs. Empowerment needs to be done to improve the quality of society in order to achieve community welfare. Micro, Small and Medium Enterprises is one of the right targets to empower, because there are still many problems and obstacles in the activities of Micro, Small and Medium Enterprises. Tulungagung Regency is an area that is vigorous in empowering Micro, Small and Medium Enterprises, one way is to build an Integrated Business Service Center (PLUT). PLUT is an institution that provides comprehensive non-financial services related to MSMEs to improve the performance of production, marketing, financing, institutional and community resource development.

This study aims to describe and analyze how the Integrated Business Service Center (PLUT) of Tulungagung Regency in empowering MSMEs in Tulungagung Regency and what are the supporting factors and inhibiting factors in empowerment. The focus of this research is the empowerment approach, the role of empowerment actors and the purpose of empowerment as well as supporting factors and inhibiting factors for empowering MSMEs. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is using Miles Huberman and Saldana analysis.

The results of this study are that the empowerment carried out by PLUT is good enough. This is evidenced by an increase in the quality of Micro, Small and Medium Enterprises, the increasing number of MSMEs joining PLUT and the growing human resources of MSME managers. Empowerment carried out by PLUT is in accordance with what is needed by SMEs, for example by providing assistance in the fields of production, institutions, financing, marketing and also HR. The role of the government, the private sector and the community is also carried out well, the government as an empowerment service provider, the private sector participates in helping the empowerment and community success as empowered objects.

**Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises, Integrated Business Service Centers.** 

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung)". Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Unibersitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkann terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan
   Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
   Brawijaya
- Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi
   Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
   Brawijaya
- 4. Bapak Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si dan Bapak Drs. Romula Adiono, M,AP selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

- mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermafaat bagi penulis.
- Ibu Marni selaku Pimpinan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung dan semua staf yang membantu.
- 7. Untuk keluarga tercinta dan tersayang, terimakasih Ibu Surjanti dan Bapak Muharsono yang selalu sabar dan tiada henti-hentinya memberikan doa, perhatian dan semangat bagi penulis.
- 8. Untuk kakakku tersayang Yunita Intan Hapsari dan adik-adikku farel Attala, Najwa Trinita, Zea Zain dan Musa Arkaan yang selalu menghibur penulis.
- 9. Untuk Muhammad Fahreza Asyrofi yang setia menemani penulis dan memberikan doa serta semangat dalam penyususnan skripsi
- Untuk teman-teman Jurusan Administrasi Publik 2015 yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

## **DAFTAR ISI**

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Konstribusi Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Terdahulu	
B. Administrasi Pembangunan	18
1. Definisi Administrasi Pembangunan	
2. Pendekatan Administrasi Pembangunan	20
3. Langkah Strategis Administrasi Pembangunan	22
C. Pemberdayaan	27
1. Definisi Pemberdayaan	27
2. Strategi Pemberdayaan	29
3. Pendekatan Pemberdayaan	29
4. Peran Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaa	n31
5. Tujuan Pemberdayaan	31
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	32
1. Definisi UMKM	32
2. Asas-asas UMKM	35

3.	Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM	37
4.	Kriteria UMKM	38
E. Ker	angka Berpikir	39
BAB III M	IETODE PENELITIAN	
A. Pen	dekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Fok	tus Penelitian	44
C. Pen	etapan Lokasi dan Situs Penelitian	46
1.	Lokasi Penelitian	46
	Situs Penelitian	
	is dan Sumber Data	
	nik Pengumpulan Data	
F. Inst	rumen Penelitian	51
G. Ana	alisa Data	53
	ASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gai	mbaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	56
1.	Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	56
2.	Gambaran Umum Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten	
	Tulungagung	75
B. Pen	yajian Data	85
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu	85
2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pusat Layanan Usaha	05
2.	Terpadu dalam Pemberdayaan UMKM	106
C Ana	alisis Data dan Pembahasan	
	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pusat	
1.	Layanan Usaha Terpadu	117
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pusat Layanan Usaha	
	Terpadu dalam Pemberdayaan UMKM	130
BAB V PE		1 / 1
	simpulan	
B. Sar	an	146
ПАБТАР	PUSTAKA	140
	AN	

## **DAFTAR TABEL**

No.	Judul Halama	n
1.	Studi Terdahulu	7
2.	Peran aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat3	1
3.	Jumlah Kecamatan Beserta Luasnya5	8
4.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten	
	Tulungagung6	0
5.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut	
	Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2016 dan 20176	1
6.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	
	di Kabupaten Tulungagung 20176	2
7.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan,	
	20176	3
8.	Lahan Menurut Jenis dan Penggunaannya di Kabupaten Tulungagung	
	20176	4
9.	Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Perairan di Kabupaten	
	Tulungagung (Hektar) 20176	6
10.	Volume dan Nilai Ikan Menurut Penangkapan Ikan Tahun 20176	8
11.	Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabuupaten	
	Tulungagung 20176	9
12.	Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) dan Industri	
	Besar/Sedang Menurut Jenis Industri dan Unit serta Tenaga Kerja	
	di Kabupaten Tulungagung 20177	2
13.	Perdagangan Menurut Kecamatan dan Bentuk Usaha Kabupaten	
	Tulungagung 20177	3
14.	Daftar UMKM yang bekerjasama dengan PLUT tahun 20178	4

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka berpikir	41
2.	Komponen Analisis Data Model Interaktif	53
3.	Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung	57
4.	Struktur Organisasi PLUT	76
5.	Struktur kelembagaan dan fungsi PLUT	77
6.	Kegiatan Konsultasi Bersama Pelaku UMKM	88
7.	Bazar Pasar Murah Ramadhan 2019	92



### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang saat ini sedang berusaha untuk memaksimalkan pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I pasal 1 ayat 2 yaitu Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mecapai tujuan bernegara. Melihat penjelasan dari Undang-undang tersebut berarti pembangunan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap Negara, karena tercapainya tujuan suatu Negara dapat dilihat dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh Negara tersebut. Salah satunya melalui pembangunan ekonomi. Menurut Irawan dan Suparmoko (2002:5) pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dari tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi dengan pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan mencapai tujuan pembangunan Nasional.

Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap daerah disuatu Negara. Peran pemerintahjuga sangat dibutuhkan guna melancarkan proses pembangunan ekonomi disuatu Negara. Peran pemerintah berkaitan langsung dengan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan kebijakan, penetapan pajak, kerjasama dengan

perusahaan dalam negeri atau asing dan juga perijinan usaha di dalam negeri. Dengan peran aktif dari pemerintah diharapkan pula masyarakat dapat bekerja sama dengan baik untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu Negara guna keberhasilan pembangunan ekonomi. Upaya untuk melancarkan proses pembangunan ekonomi pemerintah harus memacu sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi atau peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Salah satu sektor yang tepat yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab II Pasal 3 yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Indonesia sendiri cenderung bergantung kepada perusahaan besar karena dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak dan jika telah membuka lapangan kerja yang banyak maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cepat dan kemiskinan akan cepat berkurang, tetapi masalahnya adalah tidak semua lapangan perkerjaan yang tersedia dapat menyentuh semua kalangan masyarkat di Indonesia. Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi penghambat masyarakat kalangan bawah untuk mendapat pekerjaan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab III Pasal 4

Ayat 1 menyatakan bahwa Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Hal tersebut memicu pemerintah untuk terus menyelesaikan masalah tersebut dengan memberdayakan masyarakat kalangan bawah tersebut agar dapat mandiri untuk meningkatkan perekomiannya melalui UMKM.

Pada krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia banyak perusahaanperusahaan berskala besar yang berhenti dari aktifitasnya, tetapi sektor Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah ternyata lebih tangguh dalam menghadapi masalah
krisis tersebut. UMKM di Indonesia telah menyelamatkan perekonomian bangsa
pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997. Konstribusi lain UMKM adalah
pada pertumbuhan ekonomi, UMKM juga diharapkan dapat berkontribusi pada
pengurangan angka kemiskinan. Peran dan kontribusi UMKM dalam
perekonomian Indonesia harus terus ditingkatkan dan diperkuat. Usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk lebih
berkembang apabila didukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan terkait
UMKM. Dengan demikian, hal ini dapat mengindikasikan bahwa UMKM
berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang jika
dikelola secara baik dan tepat.

Menurut Kementrian Koperasi dan UKM (2005) Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta

pasar baru dan sumber inovasi, dan sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Keberadaan UMKM sangat dominan tetapi kinerjanya masih sangat tertinggal dibandingkan dengan usaha besar. Dalam Laporan Pemantauan Bappenas (2005) terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, terdapat lima permasalahan pokok. Pertama, produktivitas usaha dan tenaga kerja belum menunjukkan kenaikanyang berarti. Kinerja Koperasi dan UMKM tersebut berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya. Terutama kekurangmampuan dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan. Kedua, perkembangan iklim usaha belum sepenuhnya mendukung, diantaranya karena belum tuntasnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang Koperasi dan UMKM. Ketiga, Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah keterbatasan akses modal dan pendanaan. Keempat, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar oleh UMKM yang masih sangat kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar dan pendampingan yang berkelanjutan, sementara akses pembiayaan dan ketersediaan lembaga pendampingan usaha juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Kelima, untuk usaha mikro, permasalahan lain adalah terbatasnya sumberdaya finansial. Karakteristik usaha mikro yang bermodal kecil, dan tidak berbadan hukum dengan manajemen yang masih tradisonal belum cukup tersentuh luas oleh pelayanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Besarnya konstribusi UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi pada kenyataanya masih banyak kasus yang dihadapi oleh UMKM di Indoensia. Berdasarkan penjelasan dari Buku Pedoman Pendampingan Koperasi dan UMKM melalui Pusat Layana Usaha Terpadu Tahun (2016:13) menjelaskan kasus yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah sebagi berikut:

"Koperasi dan UMKM secara Nasional juga menghadapi tantangan berupa perubahan pasar dan perekonomian domestik dan global yang berdampak pada perubahan permintaan pasar dan daya beli masyarakat. Masalah tersebut menjadi masalah yang serius dan perlu segera diadakan percepatan peningkatan kemampuan koperasi dan UMKM agar lebih mampu untuk berkompetisi dan lebih berdaya saing. Permasalahan lain UMKM di Indonesia adalah masalah eksternal yaitu ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku, tingginya standar kualitas yang diinginkan oleh pembeli luar negeri, kualitas lingkungan kerja yang belum memenuhi syarat, kompetisi biaya, keterbatasan teknologi berbasis ramah lingkungan, keterbatasan akses pasar dan keterbatasan akses keuangan. Seluruh kondisi yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dan produktivitas koperasi dan UMKM menjadi hal yang semakin mendesak untuk dilakakukan perbaikan agar dapat mengahadapi persaingan baik lokal dan global".

Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penghambat UMKM untuk berkembang, kasus yang paling umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia adalah mengenai kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM, seperti yang dilaporkan oleh berita *online* Tribun.com (2015) yang menyatakan bahwa:

"Guna mendukung ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong pengutatan UMKM. UMKM menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Konsultan Produktifitas UMKM, Faizuddin Firdaus mengatakan bahwa para pelaku UMKM di Indonesia saat ini terkendala soal keuangan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk mengetahui dan memerhatikan bagaimana cara mengelola operasional bisnis. Saat proses operasional bisnisnya tidak bagus, maka kualitas produk menjadi tidak baik, efisiensinya menurun, dan itu yang menyebabkan pelanggan tidak mendapatkan

produk dengan baik. Untuk itu yang menjadi prioritas utama bagi UMKM adalah untuk memperbaiki kualitas produk untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan caranya dengan membuat para pelanggan tertarik dengan produk yang dipasarkan melalui perbaikan pada produksi dan lebih meningkatkan kualitas".

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM secara nasional masih cukup serius, hal dapat dilihat dari berbagai macam masalah yang kompleks dan saling mememgaruhi masalah satu dengan masalah yang lainnya. Disisi lain masalah yang dialami oleh daerah provinsi semakin spesifik, masalah atau kasus UMKM lain yang terjadi pada tingkat provinsi juga tidak kalah serius, misalnya kasus UMKM di Jawa Timur pada Tahun 2016 yaitu masalah kinerja ekspor UMKM Jawa Timur yang terkendala oleh merek dan kemasan yang menghalangi proses pemasaran produk UMKM di Jawa Timur. Dikutip dari TEMPO.CO (2016) yang melaporkan kondisi UMKM pada saat itu adalah sebagi berikut:

"Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah kendala untuk meningkatkan kinerja ekspor, salah satunya masalah merek dan kemasan produk. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, I Made Sukartha memaparkan dari 6,2 juta UMKM di Jawa Timur baru 3.476 UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Jumlah tersebut cenderung melambat dalam pertumbuhannya akibat sejumlah kendala. Sedangkan yang dalam masa merintis ekspor ada sekitar 70.000 UMKM. Masalah merek dan kemasan memang kita akui menjadi hal yang penting dalam kegiatan ekspor. Sebagai contoh mekanan ringan seperti rempeyek jika dibungkus plastik saja tanpa merek dan keterangan komposisi pasti akan laku di Indonesia, tetapi tidak akan laku diluar negeri karena konsumen membutuhkan jaminan mutu produk dan kualitas produk. Selain masalah kemasan dan merek kendala yang dihadapi UMKM di Jawa Timur adalah masalah permodalan dan pemasaran yang sangat menghalangi produktivitas UMKM di Jawa Timur".

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Jawa Timur merupakan salah satu contoh dari masalah UMKM di Indonesia, didaerah lain tentunya memiliki masalah lain yang harus segera diselesaikan. Dengan begitu peran pemerintah

sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah UMKM di Indonesia. Berbagai masalah dan tantangan yang ada dan dihadapi oleh koperasi dan UMKM membutuhkan adanya penanganan yang menyeluruh dan juga melibatkan sinergi diantara berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya difokuskan pada penanganan masalah dan tantangan eksternal, namun yang lebih penting adalah penanganan masalah dan tantangan internal, baik yang terkait dengan kapasitas SDM, pembiayaan dan juga pengelolaan usaha dan pemasaran. PenguatanUMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan dan keterampilan para pelaku UMKM. Upaya penguatan tersebut dapat melalui program pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dalam bentuk penumbuhan iklim masyarakat usaha pembinaan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Strategi untuk mengembangkan masyarakat adalah melalui pemberdayaan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan penguatan potensi yang dimiliki melalui pembinaan dan pengembangan teknik serta manajerial. Sehingga UMKM dapat berkembang besar jika ditangani dengan baik dari pihak pemerintah maupun dari para pelaku UMKM itu sendiri. Menurut Hikmat (2006) masyarakat yang telah diberdayakan melalui kemandiriannya, diharapkan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dapat mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan pihak eksternal. Setelah para pelaku UMKM

diberikan arahan, pengetahuan dan pendampingan mereka dapat menjalankan usahanya sendiri sencara mandiri dan dapat terampil dalam menjalankan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membuat masyarakat kalangan bawah menjadi mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tercantum dalam Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkedilan. Pemberdayaan **UMKM** diselenggarakan perlu secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dalam pemberdayaan UMKM terdapat aktor penting yang berperan didalamnya. Aktor penting dalam UMKMadalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta wadah untuk menampung dan membina para pelaku UMKM agar dapat berkembang dengan baik. Melalui peranan pemerintah yang cukup besar maka para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat sangatlah besar. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar tetapi juga harus menjadi masyarakat yang kreatif yang dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada didaerahnya menjadi produk unggulan. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan menyediakan layanan usaha terpadu untuk para pelaku UMKM. Penyediaan dukungan penguatan UMKM yang terpadu salah satunya adalah dapat difasilitasi melalui penyediaan layanan satu atap yang menyediakan jasa-jasa yang menyeluruh dan terintegritasi bagi pengembangan UMKM.

Upaya penyediaan layanan usaha untuk memberdayakan UMKM yang terintegritas dilaksanakan melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) didaerah hal ini sesuai dengan tujuan PLUT yaitu mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini merupakan inisiatif baru yang menjadi bagian dari prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dan 2014. Pengembangan PLUT akan difokuskan ditingkat provinsi dan akan didukung dengan pengembangan PLUT yang berbasis regionalisasi.Peraturan Menteri Koperasidan Usaha Kecil danMenengahRepublik Indonesia Nomor : 02/Per/M.KUKM./I/2016 tentangPendampinganKoperasidan Usaha Mikro Kecil yaitu diadakannya PLUT untukmembantu Koperasi dan UMKM untuk melayani pelaku usaha masyarakat untuk konsultasi dan juga pendampingan. Pengembangan PLUT juga diperkuat dengan pengembangan PLUT ditingkat pusat yang akan berfungsi sebagai pusat rujukan, koordinator, fasilitator dan

Pembina bagi PLUT yang dikembangkan ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, beragam dan tersebar hampir disemua kecamatan, menurut buku pedoman PLUT Tulungagung (2016) potensi tersebut antara lain adalah dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan energi. Untuk dapat mengolah berbagai potensi tersebut pastinya memerlukan penanganan dari pemerintah agar produk yang dihasilkan dapat bersaing. Potensi alam yang dimiliki daerah Tulungagung cukup banyak dan beragam, tetapi dalam mengelola potensi tersebut masyarakat Tulungagung belum dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

Tulungagung sendiri merupakan Kabupaten kecil yang banyak masyarakat didaerahnya tidak memiliki pendidikan tinggi yang akhirnya masyarakat tidak dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan pekerjaan. Melihat kondisi semacam ini banyak masyarakat yang akhirnya membuka usaha sendiri untuk menggerakkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan potensi alam sekitar. Namun banyak masalah yang dihadapai oleh masyarakat pelaku UMKM di Tulungagung dalam menjalankan usahanya.

Dari berbagai macam masalah tersebut permasalahan yang paling utama adalah pada masalah modal,produksi dan pemasaran, seperti yang disampaikan oleh berita *online* pada Slideshare.net (2012) yang menyatakan sebagai berikut:

"Masalah modal adalah masalah yang paling utama pada UMKM di Tulungagung. Kurangnya modal membuat para pelaku UMKM di Tulungagung kesulitan dalam mengembangkan usahanya, yang menyebabkan berbagai masalah yang mengikutinya. Yang kedua masalah produksi UMKM di Tulungagung yang paling utama adalah masalah teknologi. Teknologi yang dipakai oleh para pelaku UMKM di Tulungagung terbilang masih sangat tradisional dan kuno kondisi ini menyebabkan produksi para pelaku UMKM di Tulungagung menjadi tidak maksimal sehingga tidak bisa memproduksi dalam skala yang besar. Yang ketiga adalah masalah pemasaran, pemasaran adalah elemen yang sangat penting dalam melakukan usaha, diperlukan modal dan kreatifitas yang besar dalam melakukan sebuah pemasaran agar tercipta *branding* yang baik. UMKM di Tulungagung sebagian besar yang tidak mempunyai modal besar akan terkendala di pemasaran produknya dan akhirnya mereka tidak dapat memasarkan produknya".

Berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi UMKM di Tulungagung membutuhkan adanya penanganan yang menyeluruh dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penguatan UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, daya saing dan nilai tambah untuk UMKM di Tulungagung. Upaya penyediaan layanan usaha yang terintegrasi bagi UMKM di Tulungagung dilaksanakan melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tulungagung yang merupakan program pengembangan PLUT dari Provinsi dan Pusat.

Pusat Layanan Usaha Terpadudi Tulungagung dibangun pada tahun 2016 dengan tujuan untuk pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada para pelaku usaha. Peran penting PLUT dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Tulungagung harus diperhatikan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah agar tujuan utama Pusat Layanan Usaha Terpadu di Kabupaten Tulungagung dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Penyelenggaraan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan pelayanan usaha yang terintegrasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Tulungagung yang selama ini UMKM banyak mengalami masalah dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh.

Berdirinya PLUT diharapkan meningkatkan antusias warga masyarakat daerah lain terhadap produk lokal daerah Tulungagung, serta Dinas Koperasi dan UMKM yang didampingi PLUT dapat meningkat pelayanan terhadap warga yang memiliki usaha agar produk yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan menarik. Jika pembangunan dan implementasi PLUT berhasil maka yang diharapkan adalah peningkatan perekonomian masyarakat Tulungagung yang dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Tulungagung dan juga mengenalkan bahwa produk asli Tulungagung tidak kalah bersaing dari produk dari daerah lain. Kinerja UMKM Kabupaten Tulungagung yang awalnya produktifitasnya masih tertinggal jauh dengan usaha besar dapat berkembang dengan adanya pemberdayaan dari PLUT.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu di Kabupaten Tulungagung. Maka Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) (Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung)".

## BRAWIJAX

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tulungagung?
- 2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Tulungagung?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tulungagung.
- Untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat
   Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung.

## D. Konstribusi Penelitian

Manfaat akademis dan manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumber informasi untuk para akademis yang melakukan penelitian

- lebih lanjut tentang Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM.
- b. Sebagai pelengkap penelitian sebelumnya dan menjadi acuan dasar penelitian selanjutnya serta muncul pemahaman baru yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian lapangan terkait Pusat Layanan Usaha Terpadu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau pertimbangan pemerintah daerah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam UMKM dan melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- b. Mampu menjadi evaluasi khusus untuk Dinas Koperasi dan UMKM terhadap penyelenggaraan Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk para pelaku UMKM.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian dibutuhkan garis besar penelitian, dimana garis besar penelitian tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan ringkasan dari keseluruhan penelitian. Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdapat pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

(PLUT)yang kemudian diuraikan dalam rumusan masalah,

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II terdapat uraian mengenai landasan teori, temuan ilmiah pada buku dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai konsep administrasi pembangunan, konsep pemberdayaan, konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB III: METODE PENELITIAN** 

Bab III menjelaskan tentang langkah-langkah metode penelitian yang diambil yaitu meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data untuk melakukan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini yang berupa penyajian data yang telah diperoleh dari permasalahan yang dibahas dan tercantum didalam fokus penelitian. Kemudian data yang didapat tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab dimana terdapat dua sub bab pokok bahasan yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan itu merupakan sekilas hasil penelitian yang terangkum yang dapat ditemukan dari suatu permasalahan yang ada, sedangkan saran itu sendiri merupakan sebuah solusi atau sebagai masukan untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini.



## **BAB II**

## TINJAUAN TEORI

## A. Studi Terdahulu

Tabel 1. Studi Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Keterkaitan dengan
	(Penelitian)	Penelitian		Penelitian
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Kelautan (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan) (Anna Fiulaizi, 2017)	Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis kelautan yang dilakukan adalah meningkatkan bantuan permodalan, pemasaran, dan memeberikan pelatihan kepada masyarakat pesisisr untuk mendukung usaha mereka. Faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM berbasis kelautan ini adalah bahan baku yang melimpah, dan faktor penghambatnya adalah masalah SDM dan akses perizinan.	Penelitian terkait pemberdayaan UMKM berbasis kelautan memberikan sedikit keterkaitan dengan penelitian ini yang mana sama-sama merupakan sebuah kegiatan untuk memberdayakan UMKM agar masalah-masalah UMKM dapat teratasi dengan baik dan menjadikan UMKM dapat lebih berkembang dan mandiri.Penelitian ini merupakan program dari Kementrian Koperasi dan UMKM melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu sedangkan penelitian terkait Pemberdayaan UMKM berbasis kelautan adalah kegiatan Dinas perikanan.
2.	Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) Batik Malanhan (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, UKM Batik Kota Malang) (Priska Celine Bangun, 2018)	Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil Pemberdayaan UKM Batik Malangan meliputi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Penguatan Teknologi, Permodalan, Pemasaran, Sarana dan Prasarana. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan UKM Batik Malangan adalah Pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dan swasta yaitu PT Sampoerna dan masyarakat pelaku UKM Batik Malangan.	Penelitian terkait Pemberdayaan UKM Batik Malangan sedikit berkaitan dengan penelitian ini karena merupakan suatu kegiatan untuk terus memberdayakan UMKM atau UKM agar terus berkembang dengan berbagai kegiatan dari Dinas terkait. Penelitian ini merupakan program dari Kementrian Koperasi dan UMKM melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu sedangkan penelitian terkait Pemberdayaan UKM

			Faktor pendukungnya adalah komunikasi antar lingkungan UKM, semangat pelaku UKM, kegiatan pemasaran. Sedangkan faktor penghambatnya keterbatasan SDM dan tidak adanya paguyuban batik	Malangan merupakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM.
3	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Tas Dan Koper (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo) (Lia Oktavia, 2017)	Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Tas dan Koper meliputi 4 tahapan pemberdayaan yaitu, mengkaji potensi wilayah, permasalahan dan peluang, mengidentifikasi alternatif pemecah masalah, dukungan fasilitas dan pendampingan, dan memantau proses dan hasil kegiatan. Faktor pendukungnya adalah semangat pelaku UKM dan faktor penghambatnya adalah pengadaan bahan baku dan kurangnya inovasi.	Penelitian terkait Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Tas Dan Koper sedikit ada keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM dan UKM untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas SDM dan produknya dengan kegiatan atau program yang telah ada. Perbedaanya adalah penelitian ini merupakan program dari Kementrian Koperasi dan UMKM melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu sedangkan penelitian terkait Pemberdayaan UKM Industri Tas Dan Koper merupakan suatu kegiatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## B. Administrasi Pembangunan

## 1. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan berasal dari kata "administrasi" dan "pembangunan." Administrasi pembangunan dapat berarti suatu kerjasama dua orang atau lebih untuk menumbuhkan atau mengembangkan tujuan yang telah direncanakan. Siagian (2007) mengatakan bahwa administrasi pembangunan

mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha / rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nations building). Siagian (2007) mengatakan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencpaian tujuan akhir.

Menurut Nana (2019:12) Administrasi pembangunan merupakan sebuah pendekatan keilmuwan yang perbincangannya tiada akhir (*never ending*). Hal ini mengandung arti bahwa situasi yang menggambarkan proses yang terencana secara holistic dan bersifat jangka panjang, mampu menghadirkan *multiple effect* yang bersifat sirkuler dalam setiap aktivitas yang dilakukan dan selalu memunculkan indikator-indikator baru. Contohnya, sistem pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, *e-government*, kesejahteraan, stabilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Menurut Fred W. Riggs dalam Nana (2019:13), mengatakan bahwa administrasi pembangunan secara kontekstual memiliki dua pemahaman. Pertama, berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar, terutama pemerintah untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna menmukan sarana-sarana pembangunan. Kedua, administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung, termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif.

Menurut Nana (2019:14) administrasi pembangunan dapat dimaknai sebagai sebuah pengambilan kebijakan yang bersifat umum, penentuan perencanaan, melakuka aktivitas substansial, menjaga keseimbangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, melakukan pemberdayaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta melakukan proses pengembangan kapasitas, baik bagi aparatur maupun masyarakat.

## 2. Pendekatan Administrasi Pembangunan

Menurut Nana (2019:44) pendekatan administrasi terdiri dari pendekatan pembangunan partisipatif dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

## a. Pendekatan pembangunan partisipatif

Menurut Nana (2019) partisipasi merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat dan memengaruhi sebuah kebijakan meskipun tidak benar-benar menentukan kebijakan tersebut. Dalam dimensi lain, pembangunan partisipatif dimaknai sebagai pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Keterlibatan masyrarakat meliputi tahap perancanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Prinsip-prinsip pembangunan partisipatif yang harus menjadi perhatian diantaranya adalah :

- 1. Perencanaan program harus berdasarkan situasi empiris atau existing
- Memperhitungkan kemampuan masyarakat, kemampuan teknik, kemampuan ekonomi, kemampuan manajemen sosial, sumber daya finansial, sumber daya waktu.
- Melibatkan lebih dalam serta memrioritaskan unsur kepentingankelompok atau organisasi-organisasi dalam masyarakat.
- 4. Bersifat jangka pendek dan jangka panjang
- 5. Kemudahan untuk dilakukan evaluasi
- b. Pendekatan pembangunan berkelanjutan

Era *Millenium Development Goals* (MDGs) sudah berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan era *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tepatnya pada tanggal 25 – 27 September 2015, dunia menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan yang secara garis besar dikelompokkan dalam 4 pilar yaitu sennagai berikut :

- 1. Pembangunan manusia
- 2. Pembangunan ekonomi
- 3. Pembangunan lingkungan hidup
- 4. Governance

Empat pilar tersebut harus mampu diterjemahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perencanaan peembangunan, baik yang bersifat

jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mmerupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyelaraskna aktivitas manusia sesua dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah darata, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia.

# 3. Langkah Strategis Administrasi Pembangunan

Menurut Nana (2019:53) langkah strategis administrasi pembangunan terdiri dari :

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan Pertumbuhan dan pemerataan merupakan tujuan pembangunan yang semestinya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan. Perumbuhan ekonommi dapat dicapai dengan mendongkrak daya saing industry di bidang industri dan jasa, sedangkkan pemerataan pendapatan dapat dicapai melalui pelipatgandaan produktivitaas sector UMKM dan ekonomi informal.
- Terciptanya perluasan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Persoalan kemiskinan dan enganngguran masih menjadi maslah yang besar. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, dimana tidak salah satu faktor penyebabnya adalah tidak mempunyai pendapatan tetap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perluasan lapangan kerja menjadi solusi mendasar atas permasalahan kemiskinan dan pengangguran.

- 3. Terwujudnya Kawasan industri yang berbasis potensi wilayah
  Pembangunan Kawasan industry berbasis potensi wilayah dapat
  mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan
  menyinergikan kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha dan
  pemerintah
- Permasalahn mendasar rendahnya kualitas investasi sering berkaitan dengan rendahnya kepastian hukum, jaminan keamanan, banyaknya pungutan liar, rumitnya perizinan pendirian usaha, serta minimnya sarana infrastruktur. Oleh karenanya menciptakan lingkungan yang kondusif adalah kebijakan prioritas pemerintah, megingat iklim investasi yang kondusif akan menciptakan multiplayer effect bagi masyarakat.
- 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien Penyelengaraan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien meuntutu tanggunng jawab moral yang tinggi. Namun tanggung jawab moral dan tanggung jawab professional menjadi satu titik

lemah yang penting dalam penyelenggaraan tata pemerintah daerah. Termasuk menjadi tanggung jawab implisit yang harus dipikul oleh setia komponen penyelenggara pemerintah daerah ialah bebas dari penyakit birokrasi yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Terwujudnya transparasi dalam proses pengambilan kebijakan berbasis pendekatan partisipatif (demokrasi deliberatif)

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangankan praktik *good governance*. Praktik *good governance* menyarankan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi tentang pengambilan kebijakan dengan pendekatan demokrasi deliberatif

# 7. Meningkatkan sarana dan prasarana

Misi ini ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri dengan dukungan Kawasan Pendidikan dain infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan local, regional, nasional, dan internasional. Disamping itu, misi ini juga ditempuh melalui

- peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang public yang lebih nyaman dan terjangkau di lapisan masyarakat.
- 8. Terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas

Terwujudnya Pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas, merupakan persyaratan penting bagi terwujudnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang paling tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu, pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas adalah kondisi dimana seluruh masyarakat memeroleh akses Pendidikan yang berkualitas.

- 9. Terciptanya sinergisitas perguruan tinggi dan pemerintahan

  Terciptanya sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah
  dapat memberikan *multiplayer effect* dalam proses pembangunan.

  Dengan adanya sinergistas ini akan tercipta kerjasama yang baik
  antara Pendidikan tinggi dan pemeritah.
- Tersedianya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas

Tersedianya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas merupakan salah satu ciri masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang telah mencapai kondisi ini tidak perlu lagi khawatir mengenai akses pelayanan kesehatan karena semua telah terjamin oleh pemerintah

# 11. Program menghidupkan kegiatan social keagamaan

Program ini dapat dilakukan dengancara menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan social keagamaan dengan berbasis kepada budaya local yang telah ada

# 12. Program pemberian beasiswa

Pemberian beasiswa khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan salah satu program yang sangat penting dalam pemerataan kualitas Pendidikan. Oleh karena itu, pendataan dan metaan siswa kurang mampu merupakan langkah awal yang konkret untuk melaksanakan kegiatan ini

# 13. Sekolah gratis

Program sekolah gratis dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam Pendidikan. Meskipun saat ini telah terdapat berbagai program yang berusaha untuk meminimalisasi pembiayaan sekolah, seperti program Bantuan Operasional Sekolah, namun pada kenyataannya pungutan lainnya masih ada. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa Pendidikan benar-benar dapat diperoleh secara gratis dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

# 14. Program kemitraan perguruan tinggi

Program kemitraan perguruan tinggi berusaha untuk menjembatani potensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi, sehingga

kemudian dapat disinergikan untuk membangun negeri. Program kemitraan ini bias dikembangakan dalam berbagai aspek, misalnya kajian, penelitian dan pengabdian masyarakat

# 15. Program pelayanan kesehatan gratis

Program pelayanan kesehatan gratis merupakan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini dapat dijalankan melalui berbagai kegiatan, seperti pelayanan puskesmas gratis, pelayanan rawat inap gratis, pelayanan pengobatan gratis, dan berbagai jenis kegiatan lainnya.

# 16. Program rumah keluarga

Program rumah keluarga merupakan program untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan khususnya bagi kesehatan ibu dan anak. Program ini didirikan pada temat-tempat tertentu, khususnya tempat-tempat yang rawan bagi kesehatan ibu dan anak. Program ini akan bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu yang telah ada untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi.

# C. Pemberdayaan

# 1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan serta pembinaan dan pengembangan suatu masyarakat agar mampu serta tangguh dan mandiri. Pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan

masayarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan Lie dalam Huraerah (2008) mengatakan bahwa pemberdayaan berasal dari bahasa inggris *empowerment*, yang secara harfiah bias diartikan sebagai pemberi kuasa, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepadamasyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Sedangkan Wrihatnolo dan Dwijiwijoto (2007) mengatakan bahwa pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris *empowerment* yang juga bermakna pemberian kekuasaan karena *power* bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi juga mempunyai kuasa.

Hikmat (2006) berpendapat bahwa pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan ataupun kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya guna dalam pembangunan kemandirian mereka. Kemudian pemberdayaan juga menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya

Berdasarkan beberapa definisi diatas pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang lebih produktif dan mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan pemerintah sebagai fasilitator, jika pemerintah berperan aktif maka masyarakat juga akan ikut berpartisipasi dengan baik.

# 2. Strategi Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan diperlukan strategi baik dan tepat untuk memperlancar kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Menurut Suharto (2005:93) yang mengungkapkan bahwa pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh Lembaga non-profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahanyang dialami dan berusaha mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pendampingan dalam pemberdayaan.

Menurut Ismawan dan Priyono dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:170) menyatakan bahwa ada lima program strategi pemberdayaan yaitu antara lain adalah :

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. penumpukan modal masyarakat
- d. pengembangan usaha produktif
- e. penyediaan informasi tepat guna

# 3. Pendekatan pemberdayaan

Suharto (2014) mengatakan ada 5 pendekatan dalampelaksanaan proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan antara lain adalah sebagai berikut:

# a. Pemungkinan

menciptakan susasana atau iklim yang memungkinakna potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

# b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kembutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menujujung kemandirian mereka.

# c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus dirahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

# d. Penyongkongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

# e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjadi keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap memperoleh kesempatan.

# 4. Peran Aktor-Aktor yang Terlibat Dalam Pemberdayaan

Dalam suatu pemberdayaan terdapat aktor-aktor yang berperan didalamnya. Sulistyani (2004) merancang peran actor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. Peran aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat

Aktor	Peran Dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan Kebijakan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Mediasi	Bebagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan, juklak, penyelesaian sengketa
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemeliharaan
Msayarakat	Partisipasi dalam Formulasi, monitoring dan implementasi	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsional, kontrol, dan menjadi objek.

# 5. Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah juga terdapat tujuan pemberdayaan, antara lain adalah :

 Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

- Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Tujuan pemberdayaan menurut pendapat Suharto (2014:60) adalah sebagai berikut:

"Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya."

Dilakukannya pemberdayaan pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

# D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### 1. Definisi UMKM

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

# a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, ciri-ciri usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- 4) Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai saha mikro juga merupakan suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro.

## b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut :

 Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah

- 2) Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan / manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- 4) Harus sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnnya termasuk NPWP.

# c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebuah bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008.Ciri-ciri usaha menengah:

Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik,
 lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas
 antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi

- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengolalaan dan organisasi perburuhan, telah adanya jaminan social ketenagakerjaan, dan pemeliharaan kesehatan.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan.

# 2. Azas-Azas UMKM

Menurut Leonardus Saiman (2009:7) berdasarkan Bab 2 pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka azas-azas usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya adalah :

- a. Azas Kekeluargaan, yaitu yang menandai upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, berkeseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Azas Demokrasi Ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

- c. Azas Kebersamaan, yaitu azasyang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Azas Efisiensi Berkeadilan, yaitu azas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Azsa Berkelanjutan, yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Azas Berwawasan Lingkungan, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Azas Kemandirian, yaitu Azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM
- h. Azas Keseimbangan Kemajuan, yaitu azas pemberdayaan UMKM yng berupaya menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Azas kesatuan Ekonomi Nasional, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

# 3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Dalam Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Bab 2
Pasal 4 dan pasal 5 disebutkan mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan
UMKM, yaitu sebagai berikut:

# a. Prinsip Pemberdayaan UMKM

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dalam prakarsa sendiri
- 2) Mewujudkan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- 4) Peningkatan daya saing UMKM
- Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengenalian secara terpadu.

# b. Tujuan pemberdayaan UMKM

 Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan

- Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

# 4. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada pasal 6 kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

# a. Kriteria usaha mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
   300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

# b. Kriteria usaha kecil

1) Memiliki kekayaan brsih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai maksimal 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

# c. Kriteria usaha menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dnegan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah)

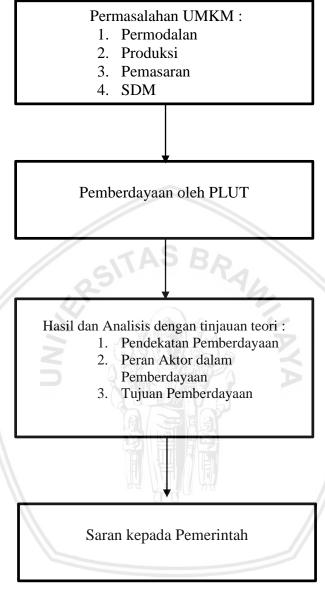
Dari penjelasan yang berkaitan dengan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahdiatas bahwa pada dasarnya definisi tentang UMKM adalah volume penjualan per tahun dan nilai riset diluar tanah dan bangunan.

# E. Kerangka Berpikir

Peranan UMKM bagi perekonomian sangatlah besar. Mulai dari penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang sangat besar potensi sumber dayanya. UMKM ini membantu mengurangi pengangguran yang menjadi masalah krusial bagi Nasional. Sehingga dengan adanya UMKM ini dapat membantu masyarakat kabupaten Tulungagung keluar dari lingkaran

kemiskinan. Namun seiring dengan berjalannya UMKM di Kabupaten Tulungagung, UMKM ini juga menghadapi beberapa masalah.

Permasalahan yang dihadapi UMKM di Tulugagung cukup kompleks diantaranya adalah masalah permodalan, masalah produksi, masalah pemasaran produk dan masalah sumber daya manusia yang mengelola UMKM. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah harus memberikan solusinya. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usata Terpadu (PLUT) untuk mengatasi permasalah UMKM di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya pemberdayaan yang di lakukan oleh PLUT akan dianalisis menggunakan teori pendekatan pemberdayaan dari Suharto (2014) yaitu antara lain pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan dan pemeliharaan, teori peran actor dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dan tujuan peberdayaan, untuk mengetahui sejauh pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh secara bertahap akan dilakukan analisis dengan metode analisi deskriptif kualitatif.



Gambar 1. Kerangka berpikir

### **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur untuk menganalisis suatu permasalahan atau fakta dilapangan berdasarkan tinjauan pustaka atau teori. Pemilihan jenis metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah syarat dari penelitian itu sendiri. Pemilihan metode penelitian yang tepat dapat menentukan kelancaran bagi seorang peneliti. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Merujuk pada jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan dengan mendeskripsikan tentang analisis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tulungagung.Sedangkan pendekatan kualitatif diambil karena peneliti lebih banyak interaksi komunikatif dalam mendapatkan data nantinya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Jadi dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mendukung penelitian dan diperkuat dengan sumber dokumen berupa catatan, gambar dan foto serta melakukan penyajian data secara deskriptif.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian ilmiah yang pendekatannya dengan meneliti kondisi objek secara alamiah. Selanjutnya, alasan peneliti memilih jenis penelitian diskriptif adalah ini adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada penggalian informasi yang mendalam yang luas tentang fenomena-fenomena dan permasalahan-permasalahan dari berbagai sumber yang ditemukan di lapangan yang terkait sebagaimana yang tertuang dalam di latar belakang/ rumusan masalah dan focus penelitian. Selain itu alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan adanya penelitian ini bertujuan untuk menangkap berbagai fenomena dan informasi yang sesuai dengan penelitian. Singarimbun (1995) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk fenomena sosial tertentu. Sedangkan Narbuko dan Achmadi (1997) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian deskriptif menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Maka penelitian deskriptif kualitatif menjadi jenis penelitian yang sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, mengintrepetasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut dan disajikan dalam bentuk tulisan.

### **B.** Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah arah atau pusat perhatian penelitian yang berguna sebagai batas-batas pada penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak melenceng dan lebih spesifik pada topik pembahasan penelitian. Fokus penelitian perlu ditentukan untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan juga dapat menyaring sebagai informasi yang relevan.

Melihat pentingnya batasan masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk lebih memfokuskan penelitian maka peneliti menurunkan pada fokus penelitian sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tulungagung meliputi:
  - a. Pendekatan Pemberdayaan menurut Suharto (2014) adalah sebagai berikut :
    - 1) Pemungkinan
    - 2) Penguatan
    - 3) Perlindungan
    - 4) Penyongkongan
    - 5) Pemeliharaan
  - b. Peran Aktor dalam Pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah
- 2) Swasta
- 3) Masyarakat
- c. Tujuan Pemberdayaan menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008,adalah sebagai berikut :
  - Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
  - Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  - 3) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
- 2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) meliputi:
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Sarana prasarana
    - 2) Pasar yang luas
    - 3) Keaktifan masyarakat
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Perkebangan teknologi dan informasi
    - 2) Sumber daya manusia

# C. Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian

# 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki kontribusi besar dalam proses pengambilan data mengenai objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian guna memeroleh data dan informasi yang diperlukan untuk rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian yang ada mampu mewakili berbagai kebutuhan penelitian yang menunjang keberhasilan suatu penelitian. Alasannya adalah situasi menarik minat peneliti dan secara nyata terlokasi di suatu tempat karena Kabupaten Tulungagung memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ikut serta berperan menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, dari lokasi penelitian ini peneliti akan mendapatkan fenomena dari objekyang diteliti.

46

# 2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat diamana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk rumusan permasalahan yang dikemukakan. Situs penelitian merupakan letak atau tempat dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Situs penelitian ditentukan agar mempermudah penetapan lokus sehingga dalam upaya ini dan mengacu pada fokus penelitian, maka peneliti mengambil situs penelitian yang dapat mendukung data dalam penelitian ini. Adapun situs penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung. Adapun alasan peneliti memilih situs ini

karena situs tersebut terlibat langsung atau berperan langsung terhadap perkembangan UMKM sebagai pemberdaya masyarakat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu, sehingga peneliti dapat mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian dari situs tersebut.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu manusia sebagai narasumber, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen dan data-data. Sumber data haruslah mendukung penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong: 2006). Hal ini karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan pengamatan langsung untuk memeroleh data.

Jenis penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis data berdasarkan cara memerolehnya yaitu data primer dan data sekunder . Sugiyono (2014) memjelaskan bahwa data primer adalah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari informan, misalnya melalui orang lain. Tetapi data sekunder tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul menjadi tidak relevan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primerdan sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

# a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau dari lapangan saat melakukan penelitian berupa wawancara dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan. Informan dipilih secara *purposive* pada subjek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti. Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini penetapan informasi kunci yangdiwawancarai disesuaikan dengan bidang tugasnya dan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama penentuan informasi kunci didasarkan pada penguasaan informasi dan data yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pimpinan Pusat Layanan Usaha terpadu
- 2. Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu
- 3. Masyarakat Pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung

# b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk mendukung data primer yang bias didapat secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari media cetak, elektronik, regulasi-regulasi, artikel-artikel dari internet, jurnal, buku-buku

ilmiah dan dokumen atau arsipyang berkaitan dengan penelitian mengenai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung. Teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis misalnya Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Buku Panduan Koperasi dan UMKM dan juga berupa informasi dari berbagai sumber yaitu jurnal yang terkait, karya tulis ilmiah, internet (web PLUT tulungagung), dan surat kabar.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengansumber data utama dansumber pendukung. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara relevan.

### 1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Sebelum memilih wawancara sebagai metoda pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan.

Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara.

Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti membutuhkan 3 kali wawancara dengan durasi waktu satu setengah jam.

# 2. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumen dari penelitian ini adalah dari Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Buku Panduan KUMKM dan juga berupa informasi dari berbagai sumber yaitu jurnal yang terkait, karya tulis ilmiah, internet (web KUMKM tulungagung), dan surat kabar

# 3. Studi Kepustakaan

Peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-

sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Peneliti melakukan studi melalui penelitian para ahli yang sebelumnya.

### 4. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

# F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memeroleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah

## a. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri dapat meggunakan panca indra dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian (Moleong; 2006) Peneliti merupakan orang yang paling paham terkait masalah dan tujuan dalam penelitian serta mengetahui latar dan kondisi tempat penelitian. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci. Maka dalam penelitian ini peneliti adalah sumber utama dalam melakukan

penelitian mengenai Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungaung.

# b. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat untuk mencatat hasil pengamatan dilapangan dan hasil wawancara oleh peneliti. Arikunto (2009) mengatakan bahwa catatan lapangan merupakan catatan peneliti yang diperoleh dengan cara mencatat, file atau data yang didapat selama melakukan penelitian dilapangan. Catatan yang dimaksud adalah catatan yang berkaitan dengan Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungaung. Catatan lapangan memiliki fungsi untuk mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang berisi tentang data atau informasi yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Tulungagung.

# c. Peralatan Pendukung

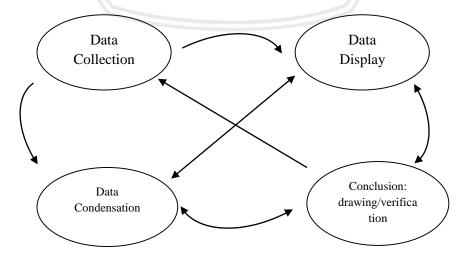
Arikunto (2009) mengatakan bahwa peralatan pendukung adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data peneliti. Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi buku catatan alat tulis menulis, perekam suara dan juga kamera. Dalam penelitian ini alat tulis menulis digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dan para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, perekam suara digunakan untuk merekam suara informan pada saat

wawancara dan kamera untuk mengambil gambar ketika melakukan observasi di lapangan.

### G. Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana sudut pandang menjadi alat analisis utama. Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mencari dan mengembangkan catatan hasil wawancara, dimana hasil analisis tersebut berguna untuk menambah pemahaman peneliti tentang judul yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alur atau model analisis data interaktif sesuai dengan teori dari Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari collection), pemilihan pengumpulan data (data data (data condensation), penyajian data(data display), penarikan kesimpulan dan (conclusion drawing/verification). Adapun model analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut:



**Gambar.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif** 

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi data sekunder mengenai Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungaung.
- 2. Pemilihan Data (Data Condensation) merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan fakta yang ada di lapangan. Dengan adanya kondensasi data, maka data yang diambil dan diperoleh mengenai Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungaungakan lebih kuat dan akurat.
- 3. Penyajian Data (*Data Display*) dapat diartikan mengorganisasi, menyusun data atau informasi, sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah di data. Penyajian data terkait Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungaunglebih banyak disajikan dalam bentuk paparan data, gambar, table dan grafik.
- 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
  merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Ketika pada

proses penarikan kesimpulan, artinya data telah di kondensasi dan di rangkai secara sistematis. Penarikan kesimpulan adalah benang merah yang berhubungan dengan fokus penelitian.



### **BAB IV**

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

# 1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kondisi potensi Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat yang meliputi kondisi geografis, kependudukan dan perekonomian.

# a. Kondisi Geografis

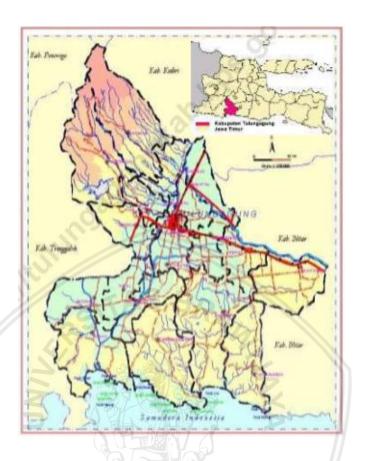
Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang terletak di pantai selatan pulau Jawa. Posisi koordinat Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111° 43' sampai 112° 07' bujur timur dan 7° 51' sampai 8° 18' lintang selatan. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

2) Sebelah timur : Kabupaten Blitar.

3) Sebelah selatan : Samudra Indonesia

4) Sebelah barat : Kabupaten Trenggalek.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung

Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2018

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,56 Km² terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara beruntutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Hal ini dapat dilihat di table berikut.

BRAWIJAY

Tabel 3. Jumlah Kecamatan Beserta Luasnya

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)
1.	Besuki	82,16
2.	Bandung	41,96
3.	Pakel	36,06
4.	Campurdarat	39,56
5.	Tanggunggunung	117,73
6.	Kalidawir	97,81
7.	Pucanglaban	82,94
8`	Rejotangan	66,49
9.	Ngunut	37,70
10.	Sumbergempol	39,28
11.	Boyolangu	38,44
12.	Tulungagung	13,67
13.	Kedungwaru	29,74
14.	Ngantru	37,03
15.	Karangrejo	35,54
16.	Kauman	30,84
17.	Gondang	44,02
18.	Pagerwojo	88,22
19.	Sendang	96,46
	JUMLAH	1.055,65

Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2014 diolah

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu dataran tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m – 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pegerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu pada Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa

### b. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan registrasi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.030.790 jiwa yang terdiri atas 502.516 jiwa penduduk laki-laki dan 528.274 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Tulungagung mengalami pertumbuhan sebesar 0,46 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 mencapai 976 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 19 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak dikecamatan Tulungagung dengan kepadatan sebesar 4843 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Tanggunggunung 209 jiwa/km². Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BRAWIJAY

Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km <sup>2)</sup>	Presentase thd. Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Besuki	82,16	7.78	35.182	428
2.	Bandung	41,96	3.97	43.472	1.036
3.	Pakel	36,06	3.42	50.455	1.399
4.	Campurdarat	39,56	3.75	57.323	1.449
5.	Tanggunggunung	117,73	11.15	24.624	209
6.	Kalidawir	97,81	9.27	64.448	659
7.	Pucanglaban	82,94	7.86	22.259	286
8.	Rejotangan	66,49	6.30	73.501	1.105
9.	Ngunut	37,70	3.57	78.643	2.086
10.	Sumbergempol	39,28	3.72	67.073	1.708
11.	Boyolangu	38,44	3.64	82.479	2.146
12.	Tulungagung	13,67	1.92	66.204	4.843
13.	Kedungwaru	29,74	2.82	90.345	3.038
14.	Ngantru	37,03	3.51	55.627	1.502
15.	Karangrejo	35,54	3.37	39.705	1.117
16.	Kauman	30,84	2.92	49.908	1.618
17.	Gondang	44,02	4.17	54.612	1.241
18.	Pagerwojo	88,22	8.36	30.593	347
19.	Sendang	96,46	9.14	44.337	460
	Tulungagung	1.055.65	100.00	1.030.790	976

(Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2018)

Sesuai dengan tabel diatas, memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya diatas 4000 jiwa/km², namun disisi lain ada kecamatan yang kurang dari 300 jiwa/km².

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2016 dan 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pend	luduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2016	2017	2016-2017
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Besuki	35.039	35.182	0.41
2.	Bandung	43.343	43.472	0.30
3.	Pakel	50.193	50.455	0.63
4.	Campurdarat	56.870	57.323	0.80
5.	Tanggunggunung	24.467	24.624	0.64
6.	Kalidawir	64.393	64.448	0.09
7.	Pucanglaban	22.231	22.259	0.13
8.	Rejotangan	73.117	73.501	0.53
9.	Ngunut	78.200	78.643	0.57
10.	Sumbergempol	66.671	67.073	0.60
11.	Boyolangu	81.700	82.479	0.59
12.	Tulungagung	66.125	66.204	0.12
13.	Kedungwaru	89.732	90.345	0.68
14.	Ngantru	55.205	55.627	0.76
15.	Karangrejo	39.656	39.705	0.12
16.	Kauman	49.848	49.908	0.12
17.	Gondang	54.587	54.612	0.05
18.	Pagerwojo	30.546	30.593	0.15
19.	Sendang	44.232	44.337	0.24
	Tulungagung	1.026.317	1.030.790	0.46

(Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2018)

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisi dan perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin karena perbedaan struktur umur akan menimbulkan perbedaan dalam aspek social-ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuh penduduk, dan masalah Pendidikan.

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2017

No	Kecamatan	Jer	nis Kelamin (ji	wa)	Rasio Jenis
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Besuki	17.583	17.599	35.182	1.00
2.	Bandung	21.037	22.435	43.472	0.94
3.	Pakel	24.479	25.976	50.455	0.94
4.	Campurdarat	28.515	28.808	57.323	0.99
5.	Tanggunggunung	11.936	12.688	24.624	0.94
6.	Kalidawir	29.936	34.855	64.448	0.85
7.	Pucanglaban	10.633	11.626	22.259	0.91
8.	Rejotangan	35.357	38.144	73.501	0.93
9.	Ngunut	37.784	40.859	78.643	0.92
10.	Sumbergempol	32.175	34.898	67.073	0.92
11.	Boyolangu	40.440	42.039	82.479	0.96
12.	Tulungagung	32.145	34.059	66.204	0.94
13.	Kedungwaru	44.883	45.462	90.345	0.99
14.	Ngantru	27.764	27.863	55.627	1.00
15.	Karangrejo	19.490	20.215	39.705	0.96
16.	Kauman	24.730	25.178	49.908	0.98
17.	Gondang	26.778	27.834	54.612	0.96
18.	Pagerwojo	15.172	15.421	30.593	0.98
19.	Sendang	22.022	22.315	44.337	0.99
	Tulungagung	502.516	528.274	1.030.790	0.95

(Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2018)

Menurut hasil registrasi penduduk tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebesar 1.030.790 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 502.516 jiwa (48,75 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 528.274 jiwa (51,25 persen). Menurut survey BPS 2017 Kabupaten Tulungagung, jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten

Tulungagung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sebesar 6.362 orang dan pada tahun 2016 ada 4.320 pencari kerja, ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan jumlah pencari kerja pada tahun 2016 ke 2017.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan, 2017

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	311.118	225.963	537.081
Bekerja	304.486	220.398	524.884
Pengangguran	6.632	5.565	12.197
Bukan angkatan Kerja	73.655	189.109	262.764
Sekolah	27.255	26.250	53.505
Megurus rumah tangga	22.973	146.568	169.541
Lainnya	23.427	16.291	39.718
Jumlah 1	384.773	415.072	799.845
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80.86	54.44	67.15
Tingkat Pengangguran	2.13	2.46	2.27

(Sumber: Tulungagung Dalam Angka (TDA) 2018)

Tenaga Kerja di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 tercatat bekerja dengan berusaha sendiri sebesar 15.48 persen dari keseluruhan pekerjaan.

#### c. Perekonomian

Wilayah selatan Kabupaten Tulungagung fisik geografis wilayahnya adalah pegunugan dan pantai namun belum memberikan sumbangan pada pendapatan masyarakat di daerah. Bidang ekonomi yang menjadi mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan.

# BRAWIJAYA

### a) Sektor Pertanian

Tanah/Lahan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu tanah swah dan bukan tanah sawah. Penggunaan tanah sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, dan sawah dengan pengairan sederhana. Sedangkan tanah bukan sawah terdiri dari pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebuh/huma, padang rumput, tambak dan kolam. Untuk penggunaan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 8. Lahan Menurut Jenis dan Penggunaannya di Kabupaten Tulungagung 2017

			Dalam	Satu Ta	hun	- //	
	Dongungan	Dit	anami Pa	ıda	Tidak	Sementara	
No	Pengunaan Lahan	3X	2X	1X	ditanami padi	Tidak di usahakan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	<sup>□</sup> (4)	(5)	(6)	(7)
Ι	Lahan Pertania	an:			-/-		
1.1	Lahan Sawah						
1	Irigasi Teknis	7.311	11.069	2.342	1.617	0	22.339
2	Tadah hujan	293	2.640	1.603	180	0	4.716
3	Pasang surut	0	107	422	0	32	561
4	Lebak	0	0	0	0	0	0
5	Polder dan Lainnya	7.604	13.816	4.367	1.797	32	27.616
Pen	ggunaan Lahan		<u>'</u>				
1.2	Lahan bukan sa	wah					
1	Tegal/Kebun						37.753
2	Ladang/Huma						251
3	Perkebunan						2.414
4	Ditanami pohon	/Hutan ra	ıkyat				4.081
5	Padang Pengger	nbalaan/I	Padang ru	mput			5
6	Sementara tidak	diusahak	(an *)				243
7	Hutan Negara						9.087

8	Lainnya ( Tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	4.182
Jun	lah Lahan Pertanian Bukan Sawah	57.980
II	Lahan Bukan Pertanian (jalan, peukiman, perkotaan, sungai, dll)	19.969
JUN	$\mathbf{ILAH}(\mathbf{I} + \mathbf{II})$	
Tota	al = Jumlah lahan sawah+Jumlah lahan pertanian bukan	105.565
	sawah+Jumlah lahan bukan sawah	103.303

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2018

Untuk penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung lebih dominan pada penggunaan lahan bukan sawah dengan total 57.980 Ha. Lahan ini terbagi menjadi tegal 37.753 Ha, lalu ladang 251 Ha dan perkebunan seluas 2.414 Ha. Hutan rakyat seluas 4.081 Ha, lalu padang rumput 5 Ha, hutan Negara 9.087 Ha dan penggunaan lahan lainnya seluas 4.182 Ha. Namun disayangkan terdapat 243 Ha yang masih belum dimanfaatkan.

Sementara itu untuk lahan sawah sendiri seluas 55.232 Ha. Lahan ini terbagi menjadi lahan sawah irigasi seluas 22.339 Ha, lahan sawah tadah hujan 4.716 Ha, dan lahan sawah pasang surut 561 Ha. Namun dalam pemanfaatannya ada beberapa lahan persawahan yang belum dimanfaatkan seluas 64 Ha dan belum ditanami padi seluas 3.594 Ha.Pemanfaatan secara maksimal yaitu penanaman padi yang dalam setahunnya bisa mencapai tiga kali tanam yaitu seluas 15.208 Ha.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung bekerja dibidang pertanian. Jenis pertanian yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah sawah dengan sistem irigasi seluas 24.975 Ha dan dengan system non irigasi seluas 2.641 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Perairan di Kabupaten Tulungagung (Hektar) 2017

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Besuki	658	355	1.013
2.	Bandung	1.226	248	1.474
3.	Pakel	2.099	91	2.190
4.	Campurdarat	756	561	1.317
5.	Tanggunggunung	0	0	0
6.	Kalidawir	1.902	99	2.001
7.	Pucanglaban	15	226	241
8.	Rejotangan	2.237	254	2.491
9.	Ngunut	1.880	0	1.880
10.	Sumbergempol	1.283	207	1.490
11.	Boyolangu	1.621	0	1.621
12.	Tulungagung	563	0	563
13.	Kedungwaru	1.305	13	1.318
14.	Ngantru	1.006	100	1.106
15.	Karangrejo	1.728	15	1.743
16.	Kauman	1.411	51	1.462
17.	Gondang	1.299	43	1.342
18.	Pagerwojo	1.446	9	1.455
19.	Sendang	2.540	369	2.909
	Tulungagung	24.975	2.641	27.616

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2018

Hasil tanaman selain tanaman pangan adalah tananam sayuran dan buah-buahan. Pemeliharaan pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara keberhasilan swasembada pangan. Namun pada tahun 2017 ratarata produksi komoditi pertanian mengalami penurunan. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung

menunjukkan luas panen tanaman sayuran mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 895 Ha. Beberapa tanaman sayuran mengalai peningkatan panen dan ada juga yang mengalami penurunan. Tanaman sayuran yang mengalami peningkatan luas panen produksinya antara lain adalah bawang merah, bawang daun, kangkong, kubis, terung, dan tomat. Sedangkan tanaman sayuran yang luas panennya turun sehingga produsinya juga menurun adalah buncis, cabe rawit, sawi, wortel, dan kentang. Produksi tanaman buah-buahan yang engalami kenaikan adalah manga, jeruk, jambu, pisang, belimbing, sirsak dan sukun.

Hasil pertanian di Kabupaten Tulungagung terdapat pertanian pangan, sayuran dan buah-buahan dan perkebunan. Produksi dari masing-masing sub sektor pertanian yang dihasilkan tidak sama atau fluktuatif dan belum dapat memenuhi kebutuhan kabupaten.

## b). Sektor Perikanan

Kabuapten Tulungagung berada dipesisir pantai laut selatan sehingga perikanan laut menjadi salah satu mata pencaharian penduduk pesisir di Kabupaten Tulungagung. Data Statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Statistik Perikanan dibedakan atas data perikanan laut dan perikanan darat. Yang tercakup dalam prikanan

darat adalah penangkapan ikan diperairan umum, budidaya, pemeliharaan ikan ditambak, kolam, keramba dan sawah. Menurut Badan Pusat Statistic Kabupaten Tulungagung produksi ikan laut pada tahun 2017 mengalami penuruanan sebesar 16,37 persen dan nilai produksinya juga mengalami penurunan jika disbandingkan dengan tahun 2016.

Pemanfaatan kolam untuk budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung ada dua macam yaitu untuk menghasilkan konsumsi dan untuk menghasilkan ikan hias. Jenis-jenis ikan yang diusahakan pada kola mikan konsumsi antara lain adalah ikan lele dan gurami. Pada tahun 2017 produksi ikan hias di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesr 23,77 persen.

Tabel 10. Volume dan Nilai Ikan Menurut Penangkapan Ikan Tahun 2017

No.	Tempat Penangkapan Ikan	Volume (Ton)	Nilai (Rupiah)
	(1)	(2)	(3)
1.	Laut	2.958.40	32.113.455.000
	Perairan Umum:	13.15	270.512.600
	A. Sungai	0.00	0
2.	B. Waduk	0.00	0
	C. Danau	0.00	0
	D. Rawa	0.00	0
3.	Budidaya air tawar	28.116.61	519.642.110.000
4.	Tambak	278.11	20.061.470.000
5.	Ikan hias	50.968.753.000	75.353.470.000
	Jumlah/Total	51000.119.00	647.440.917.600

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Produksi ikan laut Kabupaten Tulungagung masih kalah dengan produksi ikan air tawar. Pemanfaatan sumber daya didaerah

BRAWIJAY

pesisir seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar produk yang dihasilkan dapat meningkat dan dapat menjadi salah satu sektor perokonomian yang menjanjikan dan menjadi produk unggulan masyarakat daerah pesisir.

Pemanfaatan kolam untuk budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung ada dua macam yaitu untuk menghasilkan ikan konsumsi dan untuk menghasilkan ikan hias. Jenis-jenis ikan yang diusahakan pada kola mikan konsumsi ini antara lain adalah ikan tombro, lele, nila dan gurami. Sedangkan jenis-jenis ikan hias air tawar merupakan produk unggulan Kabupaten Tulungagung.

# c). Sektor Peternakan

Populasi ternak besar Kabupaten Tulungagung menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen disbanding tahun 2016. Populasi ternak besar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabuupaten Tulungagung 2017

No	Kecamatan	Sapi	Sapi	Kerbau	Kuda
			Perah		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Besuki	2.141	0	4	0
2.	Bandung	2.008	0	15	2
3.	Pakel	4.506	0	0	0
4.	Campurdarat	4.519	0	0	0
5.	Tanggunggunung	5.653	0	0	0
6.	Kalidawir	9.717	128	29	0
7.	Pucanglaban	3.674	0	0	0

8.	Rejotangan	10.399	2.287	11	7
9.	Ngunut	8.026	589	14	2
10.	Sumbergempol	11.588	112	0	1
11.	Boyolangu	4.211	0	0	0
12.	Tulungagung	368	0	5	2
13.	Kedungwaru	6.241	36	0	1
14.	Ngantru	11.597	21	0	9
15.	Karangrejo	5.792	0	62	0
16.	Kauman	3.602	0	75	7
17.	Gondang	6.185	41	28	10
18.	Pagerwojo	5.954	9.697	115	0
19.	Sendang	8.375	12.444	28	0
	Tulungagung	114.556	25.355	386	41

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2018

Dari data diatas populasi ternak Sapi yang terbesar ada didaerah Kecamatan Ngantru sementara yang paling kecil ada didaerah Tulungagung. Populasi Sapi perah yang terbesar ada di Kecamatan Sendang dan sebagaian besar Kecamatan tidak ada yang memiliki ternak sapi perah. Populasi ternak kerbau yang terbesar ada di daerah Kecamatan Pagerwojo dan semantara beberapa Kecamatan tidak memiliki ternak kerbau. Ternak kuda yang paling besar ada di Kecamatan Gondang dan sebagian besar Kecamatan tidak memiliki ternak kuda.

Ternak tersebut menyesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan, contohnya di daerah Kecamatan Sendang banyak digunakakn untuk ternak sapi perah karena Kecamatan Sendang berada di pegunungan yang bersuhu lebih dingin sehingga sapi perah lebih produktif dalam menghasilkan susu.

## d). Sektor Industri

Industri pengelohan dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja yaitu :

- Industri Besar adalah perusahaan yang memunyai pekerja
   100 orang atau lebih
- Industri Sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang
- Industri Kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja
   5-19 orang.
- 4. Industri Rumahtangga adalah usaha kerajinan rumahtangga yang mempunyai pekerja anata 1-4 orang.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung perusahaan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen dengan jumlah industry yang terbanyak pada kelompok kayu dan hasil hutan lainnya yaitu sebanyak 3.079 unit, industry ini banyak terdapat di Gondang, Sumbergempol dan Ngunut dengan jumlah industry masing-masing 1.422 unit, 504 unit, dan 303 unit. Seiring dengan bertambahnya jumlah industry kecil dan rumah tangga diikuti juga dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja banyak yang terserap pada industry tekstil,

barang kulit dan alas kaki yaitu sebanyak 17.391 tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 12. Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) dan Industri Besar/Sedang Menurut Jenis Industri dan Unit serta Tenaga Kerja di Kabupaten Tulungagung 2017

No	Jenis Industri	IKKR		Sed	ang	Besar	
	Jems maustri	Unit	Tk	Unit	Tk	Unit	Tk
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Makanan, minuman dan tembakau	1.311	6.772	18	308	23	200
2.	Tekstil, barang kulit, dan alas kaki	1.715	17.391	9	198	2	200
3.	Barang kayu dan hasil hutan lainnya	3.073	7.299		-		-
4.	Kertas dan barang cetakan	36	210	5	2	1	394
5.	Pupuk, kimia, dan barang dari karet	35	148	-	A	1	17
6.	Semen dan barang galian non-logam	1.783	5.237	1	50	4	1.124
7.	Logam dasar, besi dan baja	683	3.468	11	200	2	127
8.	Alat angkutan, mesin dan peralatannya	44	156	2	8	-	-
9.	Barang lainnya	28	370	1	10	1	126
	Jumlah		41.051	42	774	13	2.188

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2018

Seiring dengan bertambahnya jumlah industri kecil dan rumah tangga diikuti juga dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja banyak yang terserap pada industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yaitu sebanyak 17.391. Ini berarti jika sektor industr terus diberdayakan jumlahnya akan terus meningkat pesat setiap tahun dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

# e). Sektor Perdagangan

Menurut Tulungagung Dalam Angka 2018 Pembangunan perdagangan penting dalam sangat upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup terarah dalam penciptaan lapangan usaha serta peningkatan Pembangunan perdagangan diarahkan pendapatan. untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Berdasarkan bentuk dan jenis usahanya, jenis perdagangan ini terbagi menjadi 3 yaitu, perusahaan perseorangan (PERSERO), CV, Firma, BUL, Koperasi, dan PT. Untuk lebih jelasnya maka dilampirkan tabel berikut terkait usaha yang ada di Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 13. Perdagangan Menurut Kecamatan dan Bentuk Usaha Kabupaten Tulungagung 2017

No	Kecamatan	PT	Ko Pera Si	CV	Fir Ma	Per sero	BUL	Jum lah
	(1)	(2)	(3)	<b>(4)</b>	(5)	(6)	<b>(7)</b>	(8)
1.	Besuki	1	0	3	0	14	0	18
2.	Bandung	3	0	3	0	11	0	17
3.	Pakel	2	0	5	0	15	0	22
4.	Campurdarat	6	0	12	0	20	0	38
5.	Tanggunggunung	0	0	2	0	5	0	7
6.	Kalidawir	1	1	7	0	18	0	27
7.	Pucanglaban	0	0	1	0	3	0	4
8.	Rejotangan	4	0	3	0	23	0	30
9.	Ngunut	9	0	13	0	31	0	53
10.	Sumbergempol	2	0	7	0	17	0	26
11.	Boyolangu	8	0	47	0	39	0	94

BRAWIJAY

12.	Tulungagung	52	1	84	0	105	0	242
	Tulungagung		1	_	U	103	U	
13.	Kedungwaru	18	0	50	0	61	0	129
14.	Ngantru	3	0	12	0	31	0	46
15.	Karangrejo	0	0	14	0	17	0	31
16.	Kauman	2	0	27	0	41	0	70
17.	Gondang	3	0	24	0	21	0	48
18.	Pagerwojo	1	0	2	0	5	0	8
19.	Sendang	2	0	2	0	5	0	9
	Jumlah		2	318	0	482	0	919

Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2018

Menurut tabel diatas, Persero merupakan badan usaha yang paling banyak di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah total 482 Persero, dan Persero paling banyak ada di Kecamatan Tulungagung dengan jumlah total 105 Persero. Untuk badan usaha CV menduduki peringkat kedua terbanyak di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah 318 unit usaha. Kecamatan Tulungagung merupakan Kecamatan yang paling banyak mempunyai badan usaha CV yaitu ada 84 CV. Dari sektor semua badan uaha, Kecamatan Tulungagung memiliki jumlah terbanyak untuk segala badan usaha dengan total 242 badan usaha.

Gambaran umum Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kondisi geografis, kependudukan, dan perekonomian. Ketiganya menjelaskan bahwa Kabupaten Tulungagung secara geografis memiliki daerah geografis yang berbeda, ada yang didaerah pesisir atau dataran rendah di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung, daerah pegunungan atau dataran tinggi disebelah barat Kabupaten Tulungagung dan di daerah dataran sedang, dimana hal ini menyebabkan produksi usaha warga Kabupaten Tulungagung sangat beragam. Dari aspek kependudukan,

penduduk Kabupaten Tulungagung berjumlah 1.030.790 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 502.516 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 528.274 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 12.197 jiwa. Ada 5 sektor perekonomian di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor industri dan sektor perdagangan. Semua aspek kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja bahkan membuka usaha untuk masyarakat. Agar mendapatkan kualitas yang baik maka pemerintah harus memberikan pemberdayaan yang sesuai pada masyarakat, sehingga tidak hanya mampu mengentaskan kemiskinan tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan berimbas pada kemandirian masyarakat Kabupaten Tulungagung.

### 2. Gambaran Umum Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulngagung

Dalam penelitian ini data-data dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai bahan menganalisis Pemberdayaan UMKM oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tulungagung.

### a. Profil Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pusat Layana Usaha Terpadu merupakan program dari Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berdasrkan pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

BRAWIJAYA

Indonesia Nomor: 02/Per/M.KUKM./I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

PLUT diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat diberbagai bidang menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera.Adapaun strukur organisasi PLUT adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi PLUT

Sumber: Buku Pedoman PLUT 2016

PLUT merupakan lembaga penyedia jasa layanan usaha di tingkat Provinsi, yang didukung dengan unit-unit PLUT yang berbasis regionalisasi.

Struktur kelembagaan dan fungsi PLUT secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 5. Struktur kelembagaan dan fungsi PLUT

Sumber: Buku Pedoman PLUT 2016

PLUT di tingkat Provinsi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang menangani urusan UMKM.Apabila diperlukan, PLUT di tingkat Provinsi dapat membentuk beberapa unit PLUT regional untuk meningkatkan jangkauan layanan usaha bagi UMKM, serta untuk menyediakan jenis-jenis layanan usaha yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan keunggulansumberdaya setempat.Kelompok sasaran PLUT regional wilayah dapat mencakup **UMKM** di beberapa atau kabupaten/kota.

Tugas pokok dan Fungsi PLUT yaitu uraian tugas, fungsi dan tata kerja PLUT adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Pusat Layanan Usaha Terpau
- 2) Sekretaris

- a) Sub bagian Administrasi
- b) Sub bagian Galeri
- c) Sub bagian Dukungan Layanan Teknis

### 3) Himpunan Konsultasi Pendamping

- a) Bidang Kelembagaan
- b) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
- c) Bidang Produksi
- d) Bidang Pembiayaan
- e) Bidang Pemasaran.

Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas pokok sebagai pemberi layanan jasa non-finanisial sebagai solusi atas permasalahan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah kualitas kerja dan daya saing UMKM melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di Kabupaten Tulungagung. Dipimpin oleh Pimpinan PLUT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung. Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas kerja UMKM
- 2. Meningkatkan kompetensi SDM UMKM
- Meningkatkan produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh UMKM

- 4. Meningkatkan akses pembiayyaan UMKM melalui Lembaga Keungan Bank dan non Bank
- 5. Meningkatkan jaringan usaha dan kemitraan UMKM

Layanan yang diberikan oleh PLUT kepada masyarakat pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

- 1. Konsultasi bisnis
- 2. Pendampingan atau mentor bisnis
- 3. Promosi atau pemasaran, IT dan e-commerce
- 4. Akses ke sumber pembiayaan
- 5. Pelatihan bisnis
- 6. Networking dan kemitraan usaha
- 7. Bahan Proposal UMKM
- 8. Layanan pustaka pengusaha

Adapun tujuan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung untuk para pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

- Mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan UMKM
- Memperkuat peran Pemda dalam memberdayakan UMKM didaerahnya sesuai dengan amanat PP 38/2007
- 3. Meningkatkan keterjangkauan UMKM pada layanan pengembangan usaha

- Mensinergikan berbagai layanan usaha dalam satu atap bagi UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya local dan jaringan regional/nasional
- Mendorong perkembngan jejaring layanan pengembangan usaha di daerah
- 6. Meningkatkan jumlah dan perluasan usaha UMKM
- 7. Mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing.

Adapaun Sasaran Strategis Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- 1. Bertambahnya potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh UMKM
- 2. Meningkatkan produktivitas UMKM
- 3. Meningkatkan nilai tambah UMKM
- 4. Meningkatkan kualitas kerja UMKM
- 5. Meningkatkan daya saing UMKM
- Menguatnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan Bersama dengan Lembaga kemitraan setempat.

### b. Visi dan Misi

Sejalan dengan kondisi potensi pembangunan UMKM di Kabupaten Tulungagung dan sejumlah tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya, untuk itu visi Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

"MENJADI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU YANG MEMAMPUKAN KOPERASI DAN UMKM DALAM MENGEMBNGKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH".

Harapan yang ingin dicapai adalah mewujudkan UMKM Kabupaten Tulungagung sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat kabupaten Tulungagung untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan visi pembangunan UMKM Kabupaten Tulungagung maka misi Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1. Menjadi Pendamping dan pembina yang memberikan solusi permasalahan pada UMKM. (Centre for problem solving)
- 2. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada UMKM untuk mendapatkan solusi yang spesifik (*Centre of referral*)
- 3. Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktikpraktik terbaik dari pengembangan UMKM (*Centre for best practice*).

### c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulugagung dirinci sebagai berikut :

1) Pimpinan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pimpinan Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas memimpin dalam menetapkan dan merencanakan program PLUT, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan, merumuskan dan menetapka kebijakan teknis, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PLUT serta kegiatan kelembagaan.

- 2) Sekretris
  - a) Admin
  - b) Galeri
  - c) Dukungan Layanan Teknis
  - 3) Himpunan Konsultan Pendamping
    - a) Bidang Kelembagaan

Bidang kelembagaan meliputi pembentukan dan pemantapan kelembagaan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UMKM/Klaster/Kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan UMKM serta advokasi perlindungan UMKM

b) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Sumber Daya Manusia meliputi pelatihan, kewirausahaan dan magang

# BRAWIJAYA

### c) Bidang Produksi

Bidang Produksi meliputi akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek dan kemasan), diversifikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk serta aplikasi teknologi.

# d) Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke Lembaga keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan.

# e) Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (*e-commerce*), seta pengembangan data base yang terkait pengembangan UMKM.

### d. UMKM yang bekerjasama dengan PLUT

Sebagai daerah yang memiliki berbagai macam kondisi wilayah geografis, Tulungagung mempunyai berbagai macam potensi Sumber Daya Alam yang sangat kaya antara lain sumber daya alam dari perairan, pegunungan, pertanian, peternakan dan juga potensi industri yang tersebar di hamper semua Kecamatan, Jumlah penduduk yang cukup besar yakni 1.030.790 jiwa merupakan potensi yang luar biasa dalam proses pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu dari aspek ekonomi, Tulungagung juga kaya akan potensi. Diantaranya yang paling menonjol adalah *home industry*. *Home industry* tersebut misalnya konveksi, alat dapur, makanan, minuman, kerajinan seperti marmer, batik, tas, sapu keset. UMKM di Tulungagung diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha sendiri sebagai sumber pendapatan utama mereka maka permasalahan seputar UMKM juga semakin banyak. UMKM membutuhkan wadah atau rumah untuk mereka datang berkomunikasi, *sharing*, dan berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Agar permasalahan tersebut dapat diatasi pemerintah melakukan pendampingan untuk pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh PLUT.

Saat ini UMKM Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan PLUT Kabupaten Tulungagung ada 201 UMKM.

Tabel 14. Daftar UMKM yang bekerjasama dengan PLUT tahun 2017

No	Nama Usaha	Pemilik	Jenis Produksi
1.	Abid Fresh	Puji Astutik	Minuman Sari Blimbing, Dodol Blimbing, Manisan Blimbing, Selai Blimbing
2.	Jati Mulia	Deni	Meubel Kayu
3.	Sarilita Craft	Retno Sarilita S	Kerajinan dari goni, souvenir, hantaran pengantin, decoupage
4.	Batik Tulis Latar Putih	Sulastri	Batik Tulis dan Batik Printing
5.	ALK	Sabar	Makanan ringan dan kue

(Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung)

Tulungagung yang mempunyai banyak kondisi geografi menjadikan Tulungagung juga mempunyai banyak hasil produksi UMKM seperti data diatas, mulai dari hasil laut, pegunungan, pertanian hingga kerajinan.

# B. Penyajian Data

Penyajian data penelitian ini memuat informan, temuan lapangan dan pembahasan data.

# 1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

### a. Pendekatan Pemberdayaan

# 1) Pemungkinan

Menurut Suharto (2014) yang menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan, mengungkapkan bahwa pemungkinan adalah proses menciptakan susasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Sejalan dengan pernyataan diatas Ibu Marni selaku pimpinan utama PLUT Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa :

"Semua kegiatan pelayanan yang diberikan oleh PLUT kepada para pelaku UMKM tidak ada pembedaan. Semua pelayanan yang diberikan disamaratakan agar tercipta kondisi yang kondusif dan masyarakat pelaku UMKM agar dapat berkembang secara optimal hal ini untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial. Semua pelaku UMKM kami berdayakan dengan sama dan PLUT tidak mempersulit prosedur untuk mendapatkan layanan bagi pelaku UMKM baik pelaku UMKM pemula ataupun yang sudah berjalan usahanya. Semua prosedur untuk mendapatkan pelayanan tidak ada

BRAWIJAY

yang berbeda, semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dari PLUT terkait dengan usaha yang sedang dirintis. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.00)

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki UMKM baik pemula maupun yang sudah berjalan usahanya Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT bertujuan untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Tulungagung lebih sejahtera, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Hermanto selaku konsultan bidang produksi PLUT:

"Tujuan dari pemberdayaan ini otomatis adalah meningkatkan kesejahteraan masayarakat Kabupetan Tulungagung, khususnya para pelaku UMKM. Sampai sekarang ini UMKM yang bergabung dengan PLUT juga semakin banyak. Dengan banyaknya UMKM di Tulungagung hal ini dapat mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan dan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat dapat mandiri dalam mengelola UMKM dan menjadikan UMKM Kabupaten Tulungagung yang naik kelas hal ini sesuai dengan tujuan PLUT yaitu mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan UMKM dan memperkuat peran Pemda dalam memberdayakan UMKM didaerahnya." (wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 April 2019, pukul 09.00 WIB.)

Kesimpulannya adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberikan fasilitas berupa PLUT Kabupaten Tulungagung untuk para pelaku UMKM dengan memberikan segala jenis keperluan terkait UMKM yang dirasa memungkinkan untuk UMKM dapat berkembang.

### 2) Penguatan

Menurut Suharto (2014) yang menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan, mengungkapkan bahwa penguatan adalah kegiatan

memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kembutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menujujung kemandirian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh diungkapkan oleh Ibu Eni Widyawati sebagai berikut:

"Untuk penguatan yang PLUT berikan untuk UMKM yaitu dengan memberikan pendampingan untuk para pelaku UMKM. Pelaksanaan pendampingan yang kami berikan dikoordinir oleh para konsultan. Mereka akan melayani pelaku UMKM sesuai dengan masalah atau keluhan mereka, dan PLUT akan menindak lanjuti dengan memberikan pelatihan dan bimbingan. Penguatan UMKM yang PLUT berikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri, dan memenuhi kebutuhan untuk mereka berkembang. Pemecahan masalah tersebut dibantu oleh konsultan dari PLUT sesuai dengan apa yang dibutuhkan para pelaku UMKM. Lima Jenis konsultan tersebut adalah yang pertama konsultan kelembagaan, konsultan produksi, konsultan pembiayaan, konsultan pemasaran dan konsultan SDM. Jadi lima konsultan ini nanti akan membantu pelaku usaha dalam meningkatkan atau memajukan UMKM yang sedang dirintis." (berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada 16 April 2019, pukul 10.59)

Pemberdayaan yang diberikan oleh PLUT kepada para pelaku UMKM sangat beragam. Pemberdayaan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan nilai mutu UMKM Kabupaten Tulungagung. Pemberdayaan berupa penguatan UMKM yang diberikan berupa pendampingan untuk para pelaku UMKM khususnya dalam bidang produksi, pembiayaan, kelembagaan, pemasaran dan SDM.



Gambar 6. Kegiatan Konsultasi Bersama Pelaku UMKM

Pemberdayaan UMKM dilakukan bertujuan untuk penguatan UMKM dan meningkatkan produktivitas usaha hingga pemasaran produk. Selanjutnya diperlukan banyak sekali usaha dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi yang selalu menjadi masalah utama adalah permasalahan dari UMKM itu sendiri misalnya adalah masalah permodalan, masalah pemasaran, masalah produksi, masalah SDM masalah sarana prasarana dan masalah perizinan yang masih sulit. Begitu pula yang masih dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku Pimpinan utama PLUT Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

"Pada umumnya yang menjadi masalah atau kendala utama UMKM di Kabupaten Tulungagung adalah masalah modal, masalah sumber daya manusia, masalah pemasaran, masalah perizinan dan masalah dalam produksi, jadi untuk menampung dan juga menyelesaikan masalah tersebut pemerintah menyediakan konsultan untuk para pelaku UMKM, yang diharapkan dapat memberikan solusi pada setiap keluhan masyarakat." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.20)

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan pemberdayaan pada para pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh PLUT yaitu

BRAWIJAY

dengan strategi pemberdayaan melalui pendampingan dalam bidang produksi, pembiayaan, kelembagaan, pemasaran dan SDM demi mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku UMKM di kabupaten Tulungagung untuk memgatasi permasalahan UMKM.

Pendampingan yang pertama adalah pendampingan produksi seperti yang diungkapkan oleh bapak Bambang Hermanto selaku konsultan bidang produksi sebagai berikut:

"Banyak keluhan yang datang dari para pelaku UMKM terkait masalah produksi yaitu produksi yang tidak menentu karena terkendala masalah bahan baku, kemasan atau merek. Contohnya adalah dari jenis makanan, yaitu masalah produksi mereka yang tidak bisa memproduksi secara teratur dan konsisten dikarenakan masalah bahan baku, salah satu solusi dari PLUT adalah kita bisa memberikan *link* atau jaringan dari pemasok bahan baku kepada pelaku UMKM jika keluhan pelaku UMKM adalah sulitnya mendapatkan bahan baku. Masalah kemasan dan merek juga adalah masalah yang sering dikonsultasikan kepada PLUT. Para pelaku UMKM kebanyakan ingin berkonsultasi mengenai bagaimana produk mereka dikemas agar terlihat menarik dan yang bisa memenuhi standar. Dengan adanya keluham seperti itu PLUT juga memberikan pelatihan untuk merek dan kemasan." (wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 16 April 2019, pukul 09.45)

Jadi masalah produksi memang banyak terjadi. Kendala yang dialami oleh para pelaku usaha cukup banyak dalam hal produksi, tetapi PLUT juga telah menyediakan solusi-solusi untuk setiap permasalahan

Kedua adalah pendampingan dalam bidang pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian terpenting dari awal terbentuknya usaha. Pendampingan dalam bidang pembiayaan ini akan membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Efriza Pahlefi

selaku konsultan pembiayaan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Dalam hal pendampingan pembiayaan dari PLUT, PLUT membantu pelaku usaha dalam hal penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, media ke Lembaga keuangan untuk permodalan usaha. Misalnya adalah dari BNI 46, PT. Telkomsel, PT Inka yang perusahaan atau Lembaga tersebut memberikan pembiayaan dengan jasa rendah kepada pelaku UMKM. Pemberdayaan dalam bidang pembiayaan ini akan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya." (wawancara dilakukan pada 18 April 2019, pukul 09.00 WIB).

Modal merupakan bagian terpenting dalam awal terbentuknya usaha dan untuk mengembangkan usaha. Dengan semakin mudah pelaku usaha mengakses modal maka akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya baik pengusaha pemula atau yang sudah mempunyai usaha.

Ketiga adalah pendampingan dalam bidang kelembagaan. Pendampingan dalam bidang kelembagaan merupakan memberikan akses legalitas dan perijinan pada UMKM. Legalitas dan perijinan dalam usaha merupakan hal yang penting. Dimana usaha yang legal dan mempunyai izin tentu saja menentukan kepercayaan masyarakat atau konsumen. Jika usaha telah mendapatkan ijin usaha maka pemasaran produk juga akan semakin mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku konsultan bidang kelembagaan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Kelembagaan merupakan hal yang penting, karena disini pelaku usaha dapat mendapatkan akses ijin usaha. Misalkan salah satu UMKM telah mempunyai usaha tetapi belum mempunyai ijin usaha, nah ini nanti akan dibantu dan difasilitasi oleh PLUT agar mendapatkan ijin usaha. Fungsi dari konsultan kelembagaan adalah membantu megurus ijin usaha pada setiap pelaku usaha yang

mengajukan untuk meminta ijin usaha. Ijin-ijin usaha tersebut beragam sesuai dengan apa produk tersebut. Misalkan adalah ada PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) untuk produk makanan, IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) untuk produk *craft* atau kerajinan dan BPOM untuk minuman. (wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 11.00 WIB)

Ijin usaha yang telah diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Dengan begitu masyarakat akan percaya dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut sehingga UMKM akan semakin maju dan berkembang dan menjadi UMKM yang naik kelas tangguh dan mandiri.

Keempat pendampingan dalam bidang pemasaran. Pemasaran produk harus dilakukan secara tepat, maka dari itu PLUT memberikan konsultasi juga mengenai pemasaran produk. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Eni Widyawati selaku konsultan pemasaran PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Pemasaran produk UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mengenalkan produk kepada masyarkat luas bukan hanya masyarakat Tulungagung saja. Disini konsultan pemasaran bertugas untuk membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dan juga memberikan informasi seputar UMKM kepada pelaku UMKM. Adapun fasilitas yang PLUT berikan kepada masyarakat dari konsultan bidang pemasaran adalah meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT, pengembangan data base yang terkait pengembangan UMKM. Semua itu merupakan tugas dari konsultan bidang produksi. Fasilitas yang diberikan oleh PLUT kepada para pelaku UMKM dalam rangka promosi produk mereka adalah memfasilitasi galeri di Gedung PLUT, mengikut sertakan UMKM pada kegiatan pameran atau bazar, dan juga memfasilitasi promosi melalui internet yaitu melalui web.CIS Tulungagung yaitu dengan mempromosikan produk lewat media sosial. Jika pameran dan bazar nanti PLUT akan mengikutsertakan UMKM untuk mengikuti bazar atau pameran baik

yang dilaksanakan di Tulungagung maupu di luar Tulungagung." (wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.15)

Mengingat pemasaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh UMKM agar produknya dapat dikenal masyarakat luas maka PLUT memfasilitasi pelaku UMKM untuk membantu kegiatan pemasaran pelaku UMKM.



Gambar 7. Bazar Pasar Murah Ramadhan 2019

Kelima adalah pendampingan dalam bidang SDM. Pemberdayaan dalam bidang SDM merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Mengingat SDM UMKM masyarakat di Kabupetan Tulungagung masih banyak yang sangat tertinggal jauh. Disini konsultan PLUT di bidang SDM akan membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan mutu SDM para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, seperti yang diungkapkan Bapak Yanuri selaku konsultan dibidang SDM PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Pemberdayaan dalam bidang SDM untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung kita rasa sangat dibutuhkan, mengingat jika kita melakukan kunjungan ke UMKM UMKM yang ada di Tulungagung kita melihat kurangnya kualitas dari SDM yang mengelola usaha, padahal usaha yang sedang dikelola sangat berpotensi untuk menjadi produk unggulan. Untuk pelayanan yang kita berikan terkait pemberdayaan SDM para pelaku SDM

Kabupaten Tulungagung PLUT memberikan pelatihan-pelatihan produksi untuk para pelaku UMKM dan juga bimbingan teknis atau bimtek. (wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 13.10)

SDM yang ada merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung harus dikembangkan agar maksimal dalam pemanfaatnya. Mengingat UMKM yang jumlahnya banyak di Tulungagung maka SDM yang mengelola UMKM tersebut harus diberdayakan, diarahkan dan dibimbing dengan baik agar UMKM yang sedang dirintisnya dapat menjadi UMKM yang naik kelas Dengan pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh PLUT pelaku UMKM dapat secara langsung mempelajari dan melihat pengelolaan usaha yang tepat untuk usahanya.

### 3) Perlindungan

Menurut Suharto (2014) yang menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan, mengungkapkan bahwa perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus dirahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

"PLUT memberikan layanan pada masyarakat tidak dibeda-bedakan semua kami anggap sama, ingin belajar dan berkembang bersama PLUT. Untuk pelayanan seperti pendampingan konsultasi, pelatihan dan bimbingan teknis kami sama sekali tidak memungut biaya apapun.

Hal ini dikarenakan kami ingin semua lapisan masyarakat bisa merasakan kesempatan yang sama. Jadi di PLUT ini tidak di dominasi oleh kelompok UMKM yang sudah besar, tetapi semua membaur menjadi satu antara UMKM pemula dan UMKM yang sudah besar. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.37)

Pendapat lain diungkapkan oleh Ibu Eni Widyawati selaku konsultan bidang pemasaran yang mengungkapkan bahwa :

"Fokus kami yaitu terutama untuk rakyat kecil yang sedang merintis usaha. Sehingga PLUT tidak akan ada diskriminasi dan didominasi oleh kelompok besar. Usaha kita untuk merangkul mereka dengan mendatangi wilayah-wilayah yang terpencil. Jadi kami tidak hanya menunggu pelaku UMKM datang ke PLUT tetapi kita juga mendatangi mereka. Hal ini kami lakukan guna untuk memperkenalkan PLUT pada masyarakat yang lebih luas, terutama untuk para pelaku UMKM yang kekurangan akses untuk keluar daerah mereka. Semua jenis pelayanan juga tidak ada yang kami bedakan antara kelompok usaha besar maupun keciil. Tujuan kami memberdayakan mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Untuk memperkuat UMKM yang masih pemula kita juga mengajak usaha besar untuk membantu UMKM pemula. Dengan memberikan kesempatan berupa pelatihan atau kerjasama dengan usaha besar agar mereka juga saling menguntungkan. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.15)

UMKM diharapkan dapat berkembang secara pesat dengan dibantu oleh PLUT dan kelompok usaha besar lain. Memberikan pelayanan yang sama untuk semua para pelaku UMKM merupakan hal yang harus dilakukan, sehingga pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Pemberian pelayanan yang merata juga diharapkan bisa menjadikan semua pelaku UMKM dapat berkembang bersama dan berdampingan. PLUT berusaha untuk memberikan pelayanan kepada semua

lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian PLUT tidak di dominasi oleh satu kelompok dan tidak ada diskriminasi dalam proses pelayanan.

# 4) Penyongkongan

Menurut Suharto (2014) yang menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan, mengungkapkan bahwa penyongkongan merupakan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"PLUT juga membantu UMKM untuk berkembang dengan pelatihan-pelatihan, dukungan memberikan sarana prasarana, keterampilan, bimbingan-bimbingan, peningkatan memberikan informasi terkait dengan UMKM yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT. Bentuk dukungan lain adalah PLUT juga mempermudah akses permodalan untuk para pelaku UMKM, agar usahanya lebih mudah untuk berkembang. PLUT telah bersinergi dengan Lembaga keunagn untuk maslah permodalan UMKM." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.30)

Pemberian pelatihan, sarana dan prasarana atau bimbingan merupakan hal yang sangat harus dilakukan dalam proses pemberdayaan. Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari proses pemberdayaan. Dimana melakukan pelatihan bisa menambah keterampilan dari para pelaku usaha, memberikan sarana dan prasarana dapat meningkatkan semangat untuk diberdayakan dan juga memberikan bimbingan teknis agar pelaku UMKM dapat mengetahui segala informasi mengenai UMKM. Hal yang serupa diungkapkan oleh Ibu Eni

Widyawati selaku konsultan pemasaran PLUT kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Kegiatan yang diberikan oleh PLUT untuk menunjang pemberdayaan UMKM antara lain adalah memberikan pelatihanpelatihan yang selama ini peserta pelatihan terus bertambah. Pelatihan diadakan untuk menambah keterampilan para pelaku UMKM agar nantinya mempunyai pengetahuan yang lebih dan mempunyai keterampilan yang baik. Selanjutnya sarana dan prasarana yaitu misalnya PLUT menyediakan galeri PLUT untuk menunjang pemasaran produk UMKM Kabupaten Tulungagung dan prasarana berupa pengurusan perizinan. Selanjutnya yaitu melakukan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemberian informasi seputar UMKM kepada para pelaku UMKM agar wawassan mereka semakin luas." (wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.27)

Memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena fasilitas tersebut dapat menunjang keberhasilan pemberdayaan UMKM. Memberikan dukungan-dukungan untuk para pelaku UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan agar UMKM dapat berkembang lebih baik lagi dan UMKM Kabupaten Tulungagung tidak kalah saing dengan UMKM daerah lainnya.

### 5) Pemeliharaan

Menurut Suharto (2014) yang menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan, mengungkapkan bahwa pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjadi keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap

memperoleh kesempatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut :

"Untuk menjadikan UMKM yang tangguh dan mandiri kita melakukan kegiatan pendampingan berkelanjutan untuk memelihara UMKM agar tetap pada kondisi yang kondusif. Artinya kita memberikan dukungan berupa pelatihan atau bimbingan yang berkelanjutan untuk mengawasi proses berkembangnya UMKM. Disini kita memberikan motivasi untuk para pengusaha agar *mindset* mereka lebih maju dan lebih termotivasi utuk menjadi pengusaha yang besar." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.35)

Pemeliharaan yang dilakukan oleh PLUT harus dilakukan untuk mengontrol proses produksi UMKM. Pemeliharaan UMKM merupakan langkah pemberdayaan yang sangat berpengaruh pada kemajuan UMKM. Dengan pendampingan berkelanjutan makan UMKM akan lebih bisa dikontrol dengan baik. Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Eni Widyawati yaitu sebagai berikut:

"Pemberdayaan yang PLUT berikan harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat agar terjadi keadilan dan keseimbangan. Pemberdayaan yang PLUT berikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat. Pemberian pemberdayaan yang kami berikan saat ini dilakukan dengan penyuluhan dan juga berada di gedung PLUT. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.37)

Pemberdayaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pemberdayaan harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Pendampingan berkelanjutan untuk UMKM yang diberdayakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dapat menunjang peningkatan kualitas UMKM.

# b. Peran Aktor dalam Pemberdayaan

# 1) Peran Pemerintah

Menurut Sulistiyani (2004) terdapat aktor-aktor yang berperan dalam pemberdayaan salah satunya adalah pemerintah, yang mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam pemberdayaan yaitu sebagai pembuat formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring, evaluasi serta mediasi. Salah satu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah membentuk lembaga untuk menjangkau titik terkecil dari mesyarakat demi menunjang jalannya pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eni Widyawati selaku Konsultan bidang pemasaran di PLUT Kabupaten Tulungagung

"Potensi di semua bidang Kabupaten Tulungagung sangat beragam, dan banyak masayrakat yang memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai lahan untuk usaha. Di Kabupaten Tulungagung banyak sekali terdapat UMKM, mereka membutuhkan rumah atau wadah untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka supaya ada yang menampung dan memberikan solusi pada setiap permasalahannya mereka. Kemudian oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung saat itu mempunyai inisiatif untuk mendirikan PLUT disini karena bertepatan dengan pusat Kementrian Koperasi dan UMKM mempunyai program PLUT. Jadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung mengusulkan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM untuk mendirikan PLUT di Tulungagung dan disetujui. Berdirinya PLUT sendiri pada tahun 2016 dan bisa seluruhnya aktif pada tahun 2017. Alasan kenapa Kepala Dinas Kabupaten Tulungagung mengusulkan berdirinya PLUT di Tulungaguung adalah karena melihat banyaknya potensi alam dan masyarakat pelaku UMKM yang bisa digali lebih dalam pemberdayaan-pemberdayaan dengan yang diberikan pemerintah. Diharapkan dengan adanya PLUT tersebut UMKM Kabupaten Tulungagung dapat naik kelas, berdaya saing, mempunyai produk yg unggul, berdaya saing dan meningkatkan

perekonomian masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan mandiri." (wawancara pada tanggal 16 April 2019. Pukul 10.52)

Berdasarkan hasil data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM di Kabupaten Tulungagung membutuhkan wadah atau rumah untuk menyelesaikan berbagai kepentingan seputar UMKM baik permasalahan UMKM, keluhan, untuk konsultasi atau pelatihan-pelatihan. Disini pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Koperasi dan UMKM juga ikut berperan aktif dalam pemberian akses untuk pelaku UMKM agar dapat naik kelas dengan mengusulkan pembangunan PLUT di Tulungagung. Banyak keuntungan yang bisa didapat jika bergabung dengan PLUT misalnya mendapatkan pelatihan, memfasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses permodalan, pengurusan perijinan usaha konsultasi dan juga mendapat fasilitas galeri dan juga dapat mengikuti pameran-pameran.

# 2) Peran Swasta

Menurut Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa peran swasta dalam pemberdayaan yaitu sebagai kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Efriza Pahlevi selaku konsultan bidang pembiayaan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Untuk peran swasta dalam pemberdayaan di PLUT ini yaitu dari perusahaan besar yaitu untuk memberikan pelatihan, membagi pengalaman dalam berusaha dan bimbingan pada UMKM dampingan PLUT. Misalnya adalah Ajinomoto, Signora dan rumah kemasan dari Bandung. Mereka memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Contohnya dari Ajinomoto mereka memberikan pelatihan pembuatan bakso, sempol

atau cilot. Jadi pengalaman dan keahlian dari perusahaan besar dapat digunakan oleh UMKM." (wawancara dilakukan pada 18 April 2019, pukul 09.00 WIB).

Dari hasil data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pihak swasta dalam pemberdayaan UMKM oleh PLUT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Dalam implementasinya pendampingan, pelatihan dan bimbingan dari perusahaan besar diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan skill mereka.

# 3) Peran Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004) peran masyarakat dalam pemberdayaan adalah ikut berpartisipasi dalam formulasi, monitoring, implementasi dan juga memberikan saran, kritik, partisipasi, menghidupkan fungsional, kontrol dan menjadi objek. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Peran masyarakat dalam pemberdayaan tentu saja sebagai objek dari kegiatan pemberdayaan, khususnya yaitu masyarakat yang memiliki usaha maupun yang mau merintis usaha. PLUT akan membentu segala keperluannya. Saran dan kritik dari para pelaku UMKM juga sangat kami terima untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung dari partisipasi dari masyarakat, maka dari itu kami gencar melakukan sosialisasi terkait informasi-informasi mengenai PLUT untuk para pelaku UMKM." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.55)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT sangat penting. Jika masyarakat aktif dalam kegiatan pemberdayaan seperti aktif dalam pendampingan, konsultasi, pelatihan dan bimbingan maka pemberdayaan yang

menyeluruh untuk pelaku UMKM akan tercapai dan tujuan pemberdayaan UMKM akan mudah tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Puji Astutik selaku pemilik usaha olahan belimbing (Abid Fresh) yang mengungkapkan terkait keikutsertaannya dalam pemberdayaan PLUT kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Awalnya saya bergabung dengan PLUT karena saya ingin mengembangkan usaha saya. Kebetulan usaha saya merupakan produk makanan dan minuman. Saya datang ke PLUT awalnya berkonsultasi mengenai kendala usaha saya, seperti bahan baku, produksi dan pemasaran. Permasalahan saya dibantu diselesaikan oleh PLUT dengan memberikan saran, pelatihan dan pemgetahuan. Dari bergabungnya dengan PLUT saya juga otomatis menambah jaringan usaha saya, jadi alhadulillah dengan bergabung dengan PLUT usaha saya semakin berkembang. Tetapi saran saya terhadap PLUT adalah dari segi penataan galeri yang berada di Gedung PLUT harus diperbaiki agar produk yang dipajang dapat terlihat dengan jelan dan menarik"

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT sudah membantu para pelaku UMKM tetapi harus tetap melakukan perbaikan dalam melayani masyarakat pelaku UMKM agar tujuan dan fungsi dari PLUT dapat tercapai.

# c. Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM terdapat tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

 a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung adalah untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Pemberdayaan yang kami lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas UMKM Kabupaten Tulungagung agar UMKM dapat naik kelas dan bisabersaing ditingkat nasional. Diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tulungagung dan tentunya nanti juga berdampak pada pembangunan perekonomian nasional. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.15)

PLUT berusaha untuk memberikan pelayana yang baik untuk masyarakat khususnya para pelaku UMKM di kabupaten Tulungagung. Pelayanan tersebut yaitu pemberdayaan untuk para pelaku UMKM agar UMKM dapat lebih berkualitas dan naik kelas dan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Tulungagung dan berdampak pada peningkatan perekonomian Nasional.

b) Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Hal ini sejalan dengan tujuan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu meningkatkan keterjangkauan UMKM pada layanan pengembangan usaha, mendorong perkembangan jejaring layanan pengembangan usaha di daerah dan mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pemberdayaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan mandiri. Hal tersebut dirasakan oleh Ibu Puji Astutik selaku pemilik usaha olahan belimbing (Abid Fresh) yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Saya mengikuti pendampingan dari PLUT yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk saya. Karena saya pikir dari PLUT saya akan mendapat banyak pengetahuan dan menambah keterampilan saya. Contohnya kemasan produk olahan belimbing saya dulu tidak beragam seperti sekarang dan dulu hanya kemasan seadanya pokoknya bisa dijual. Tetapi setelah saya mengikuti pelatihan packaging dari PLUT dan saya berkonsultasi dengan konsultan PLUT saya dijelaskan mengenai apa itu kemasan produk, apa saja fungsinya dan bagaimana cara memeroleh kemasan tersebut. Maka saya mengganti dan menambah variasi kemasan saya. Yang dulunya hanya dengan kantong plastik biasa sekarang beragam macam seperti plastik gelas dan juga berbagai ukuran botol. Dengan begitu kualitas produk saya lebih terjamin mutunya dan lebih banyak diminati masyarakat, dampaknya usaha saya semakin besar dan mandiri. (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 11.20 WIB)

Dari penjelasan dari para pelaku UMKM tersebut dapat disimpulkan bahwa PLUT telah memberikan solusi kepada pelaku UMKM yang mengeluhkan masalah mereka. Selain solusi, PLUT juga membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan akses untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dengan begitu pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT akan dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sabar selaku pemilik usaha dan makanan ringan (ALK) yang mengungkapkan bahwa:

"Pada saat saya datang ke PLUT untuk mengikuti pelatihan usaha, produk saya pada saat itu belum memiliki ijin. Pada saat pelatihan itu sayan mendapat informasi terkait perizinan produksi yang dapat dibantu oleh PLUT. Kemudian saya berkonsultasi pada konsultan untuk bisa mendapat nomer ijin tersebut dan sekarang produk saya sudah memiliki ijin. Dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan dan juga seminar yang diadakan oleh PLUT saya lebih mempunyai wawasan tentang UMKM, usaha saya kini juga lebih mandiri dalam produksi dan lebih bisa stabil" (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 15.15 WIB)

Perijinan pada usaha merupakan hal penting, karena dengan adanya ijin usaha pada produk usaha maka bisa dijamin jika produk tersebut aman untuk dipasarkan, dikonsumsi dan juga digunakan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memiliki ijin juga pasti akan meningkat. Produk UMKM akan lebih bermutu dan bisa bersaing di pasaran. Untuk mengembangkan UMKM agar lebih tangguh dan mandiri PLUT juga menyediakan pelayanan berupa promosi. Seperti diungkapkan oleh Ibu Sulastri selaku pemilik usaha kain atik (Latar Putih) yang mengungkapkan bahwa:

"Untuk promosi dan pemasaran sangat terbantu dengan adanya PLUT karena kami UMKM dimudahkan untuk akses masuk dan ikut pada pameran atau bazar yang sedang diselenggarakan. Semua keluhan yang pernah saya diskusikan juga bisa terjawab dengan baik, namun yang saya sayangkan adalah produk yang saya titipkan pada galeri di PLUT penjualannya tidak begitu laris, dikarenakan penataan kain batik saya di galeri PLUT yang kurang menarik, batik saya hanya dilipat kecil sehingga tidak terlihat motifnya, seharusnya kalau batik itu cara penataanya di buka kainnya dan dilebarkan, maka detail motifnya akan terlihat dan juga menjadi menarik." (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2019 pada pukul 09.30 WIB).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan terkait promosi dan pemasaran dari PLUT sudah diberikan secara baik namun harus tetap ada perbaikan dan juga harus mendengarkan saran adari masyarakat. Jadi dengan memberikan pelayanan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi diharapkan UMKM dapat bertumbuh kembang sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

c) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu memperkuat peran Pemda dalam memberdayakan UMKM didaerahnya sesuai dengan amanat PP 38/2007, mensiergikan berbagai layanan usaha dalam satu atap bagi UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dan jaringan regional atau nasional dan meningkatkan jumlah dan memperluas UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan PLUT Kabupaten tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Tujuan PLUT adalah untuk memberikan rumah untuk para pelaku UMKM, fasilitas yang ada juga adalah untuk meningkatkan kualitas UMKM, dan yang diharapkan adalah terjadinya pemerataan pendapatan, mempercepat pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Tulungagung. Dengan memamfaatkan SDM dan SDA yang tersedia untuk berjalannya UMKM kami berharap juga dapat mengentaskan kemiskinan. Kami selalu memberikan *mindset* kepada masyarakat agar mau untuk membuka usaha, dengan membuka usaha SDM akan lebih meningkat karena harus lebih bekerja keras, dan jika UMKM sudah terbuka pasti juga akan menyerap tenaga kerja." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.20)

UMKM diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena semua lapisan masyarakat bisa terjangkau oleh UMKM jika ada kemauan untuk membuka usaha. Disini PLUT juga akan membantu segala macam hambatan yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Era salaku pemilik usaha tas goni dan kerajinan (Sarilita) yaitu sebagai berikut:

"Saat saya mengikuti pelatihan saya juga bisa langsung memperluas jaringan usaha saya produk saya juga semakin banyak dikenal oleh teman wirausaha lain. Saya pernah mengikuti pelatihan dalam bidang produksi usaha, disitu saya alhamdulillah diberi modal untuk membeli alat yang tujuannya adalah produksi saya bisa cepat dan efisien. Selain itu saya juga sering menjadi narasumber dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan dan juga saya mempekerjakan warga sekitar untuk membantu produksi saya. Menurut saya jika para pelaku usaha mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan PLUT banyak manfaat yang diambil, banyak ilmu vang bisa di praktekkan didalam dunia usaha untuk mengelola usaha agar usaha bisa lebih berkembang dan maju. (wawancara dilakukan pada 5 Mei 2019 pada pukul 10.24)

UMKM di Kabupaten Tulungagung sangat membutuhkan pelayanan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Pelayanan yang diberikan oleh PLUT adalah salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas UMKM khususnya di Kabupaten Tulungagung untuk dapat mencapai pemerataan pendapatan. Hal itu sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung.

# 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Mennegah

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan UMKM adalah faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat jalannya pemberdayaan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar dari UMKM itu sendiri. Berikut adalah uraian faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

# a. Faktor Pendudukung

Untuk menciptakan UMKM yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) didukung oleh adanya faktor yang mendukung proses pemberdayaan tesebut. Dalam pemberdayanaan UMKM di Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan UMKM tersebut sehingga dapat bejalan dengan baik dan efektif. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

# 1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana merupakan hal yang menunjang untuk kegiatan produksi usaha. Pelaksanaan suatu usaha yang paling utama selain permodalan adalah adanya sarana prasarana yang mendukung. Sarana prasarana sangat memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan. Seperti halnya hasil wawancara dengan Ibu Marni sealaku pimpinan PLUT Kabuaten Tulungagung:

"Ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang produksi UMKM adalah hal yang penting. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM yaitu melalui banyak pihak. Misalnya kami dari PLUT memberikan sarana dan prasarana pendampingan dan bimbingan, terdapat Gedung PLUT yang berisi aula untuk pelatihan, galeri, ruang konsultasi, pelatihan-pelatiha, bimbingan, kunjungan ke daerah, ruang dan juga tersedia ruang kreatif, itu semua kami sediakan untuk para pelaku UMKM. Kemudian ada juga sarana prasarana dari Dinas terkait misalnya Dinas Perindustrian dan perdagangan yang biasanya memberikan

bantuan seperti alat-alat yang ringan untuk keperluan produksi. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.00)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Hermanto selaku konsultan produksi PLUT Kabupaten Tulungagung, yang mengatakan bahwa:

"PLUT menyediakan sarana prasarana untuk para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Saat ini PLUT menyediakan galeri untuk pameran produk UMKM, aula pelatihan dan bimbingan, memberikan informasi seputar UMKM terkini, dan juga memberikan pendampingan konsultasi. Bantuan tersebut terselenggara dengan dari dana APBD. (wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 16 April 2019, pukul 10.10)

Sarana dan prasarana yang diberikan oleh PLUT dan Dinas terkait sangat diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sabar selaku pemilik usaha makanan ringan ALK, yang engatakan bahwa:

"Untuk sarana dan prasarana yang diberikan oleh PLUT dan Dinas terkait saya juga mendapatkan. Sarana dan prasarana yang saya dapatkan yaitu berupa pelatihan dan bimbingan gratis, fasilitas yang ada di PLUT misalnya adalah galerinya, produk saya juga dipamerkan disitu. Untuk bantuan alat saya pernah mendapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sarana prasarana tersebut sangat mendukung proses kegiatan UMKM saya, yang secara perlahan mulai berkembang pada saat ini." (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 15.45 WIB)

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh PLUT sangat memengaruhi proses kegiatan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

UMKM di Tulungagung bisa memenfaatkannya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sarana prasarana yang diberikan

oleh PLUT semua berkaitan satu sama lain. Mulai dari permodalan, pelaku UMKM bisa mnegajukan modal usaha untuk usaha perintis atau mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas SDM agar menunjang proses usaha, dari bidang produksi PLUT memfasilitasi pelatiham untuk proses produksi agar produk bisa berkualitas, jika produk telah ada akan dibantu mengenai izin produksi agar produk lebih terpercaya, selanjutnya adalah urusan pemasaran produk juga akan di bantu untuk memasarkan atau promosi produk UMKM tersebut.

Semua keluhan akan ditampung oleh PLUT dan akan diberikan jalan keluar. PLUT akan memberikan arahan dan bimbingan tergantung apa yang dikeluhkan oleh para pelaku PLUT tidak terkecuali. Sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh PLUT juga untuk semua UMKM yang ingin dibantu oleh PLUT dan diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana tersebut UMKM Kabupaten Tulungagung bisa naik kelas.

# 2) Pasar yang Luas

Jumlah UMKM di Kabupaten Tulungaungung semakin hari semakin bertambah banyak. Angka permintaan produk dari UMKM Kabupaten Tulungagung juga semakin tinggi karena kualitas produknya yang juga semakin baik. Baik permintaan dari Kabupaten Tulungagung sendiri maupun dari daerah lain. Berdasarkan hasil

wawancara yang diakukan oleh peneliti dengan Ibu Eni Widyawati selaku konsultan pemasaran PLUT Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

"Pasar untuk Kabupaten UMKM Tulungagung Permintaan dari produk UMKM juga semakin meningkat yang dikarenakan produk dari UMKM itu sendiri semakin berkualitas juga. Pasar juga lebih cepat meluas karena adanya pemasaran usaha melalui internet atau online. Para pelaku usaha itu sendiri juga semakin melek teknologi dan memanfaatkan internet untuk mengembangkan bisnis mereka, jadi pasar semakin luas sekarang ini. Kami memantau sejauh ini pemasaran UMKM binaan PLUT pada saat ini sudah mengirim ke sejumlah daerah bahkan di luar pulau jawa, karena UMKM binaan kami juga pernah menjadi pembicara di seminar kewirausahaan di luar pulau jawa." (wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2019 pada pukul 11.57 WIB)

Produksi yang semakin besar menyebabkan pasar yang semakin luas juga, ini disebabkan karena promosi yang semakin gencar dilakukan juga dilakukan, baik lewat bazar, pameran, maupun media social. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Puji Astutik selaku pemilik usaha olahan Belimbing yaitu sebagai berikut:

"Produk saya sekarang ini pemasarannya semakin luas. Saya mengirim di Tulungagung dan juga diluar Kabupaten Tulugagung bahkan diluar pulau Tulungagung. Saya juga pernah menjadi narasumber dalam suatu seminar kewirausahaan di luar pulau jawa, nah itu menjadi ajang promosi produk saya juga, Alhamdulillah responnya baik dan sampai sekarang tetap menjadi konsumen saya." . (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 11.50 WIB)

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Deni selaku pemilik usaha Meubel Jati Mulia yaitu mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

"Produk meubel saya memiliki pasar yang cukup luas. Saya sering mendapat pesanan dari luar daerah Tulungagung., dan juga sudah sering mengirim barang ke luar kota. Promosi yang saya gunakan saat ini yaitu dengan menggunakan media social seperti *Instagram, WhatsApp* dan juga *facebook*. Cara seperti itu merupakan cara yang tepat untuk memasarkan produk karena mudah dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Efeknya adalah produk menjadi banyak dikenal luas oleh masyarakat dan pasar tentunya semakin luas." (wawancara dilakukan pada 10 mei 2019 pada pukul 15.00 WIB).

Pasar yang luas membuat para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat dalam segi kualitas dan kuantitas. Dengan pasar yang cangkupannya luas dan jelas, akan mempermudah pelaku UMKM dalam mendirikan dan mengembangkan usahanya. Dengan produk-produk UMKM Kabupaten Tulungagung yang semakin baik besar harapan untuk Kabupaten Tulungagung semakin dikenal luas khusunya produk-produk dari UMKM Kabupaten Tulungagung.

### 3) Keaktifan Pelaku UMKM

Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UMKM sangat di pengaruhi oleh keaktifan para pelaku UMKM dalam keikutsertaan pembedayaan. Semakin aktif pelaku usaha yang mengikuti pemberdayaan maka hasil dari pemberdayaan semakin bisa dirasakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan utama PLUT Kabupaten Tulungagung:

"Antusiasme dan keaktifan para pelaku UMKM dalam mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT sekarang

ini cukup tinggi dan semakin bertambah banyak. Terlihat saat kita mengadakan pelatiham atau bimbingan, selalu pesertanya semakin banyak. Keaktifan mereka juga dalam bentuk aktif dalam berkonsultasi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh UMKMnya, aktif dalam mengikuti kegiatan yang kami adakan dan juga antusiasme untuk bergabung dengan PLUT lewat sosialisasi yang kita selenggarakan juga cukup tinggi disetiap daerah. Akhirnya mereka tertarik bergabung dengan PLUT dan menjadi UMKM yang kami berdayakan." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.10)

Dalam memberdayakan UMKM keaktifan para pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Jika para pelaku UMKM aktif dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan maka tujuan dari pemberdayaan UMKM akan tercapai dan yang diberdayakan akan semakin banyak. Jika UMKM semakin banyak yang diberdayakan maka kualitas dan kuantitas UMKM akan semakin meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Era selaku pemilik usaha *craft* Sarilita yaitu mengungkapkan bahwa:

"Saya aktif dalam setiap acara yang diadakan PLUT karena menurut saya PLUT merupakan wadah atau rumah untuk usaha yang sedang saya rintis ini. Keluhan bisa saya sampaikan, promosi bisa dibantu, proses produksi diberi pelatihan, keuangan juga bisa dibantu oleh PLUT, memperbanyak *link* untuk usaha saya dan juga bisa memperluas jaringan usaha saya lewat kegiatan-kegiatan dari PLUT, maka dari itu saya aktif dalam kegiatan PLUT karena saya rasa banyak manfaat yang saya rasakan. (wawancara dilakukan pada 5 Mei 2019 pada pukul 10.30)

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Puji Astutik selaku pemilik usaha olahan Belimbing (Abid Fresh) yang mengungkapkan bahwa:

"Saya sering megikuti pelatihan yang diadakan oleh PLUT, sering mengikuti bazar atau pameran, dan juga beberapa kali

berkonsultasi dengan PLUT mengenai keluhan saya. Menurut saya PLUT merupakan wadah untuk UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan usaha dan juga PLUT bisa menambah rekan dalam bidang UMKM di Tulungagung." (wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 11.55 WIB)

Peran PLUT dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Tulungagung juga dipengaruhi oleh keaktifan para pelaku UMKM dalam keikutsertaan anpemberdayaan yg diadakan oleh PLUT. Semakin aktif UMKM maka tujuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan dan menaikan kelas UMKM di Kabupaten Tulungagung akan semakan mudah tercapai.

# b. Faktor Penghambat

Dalam menciptakan UMKM yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan UMKM melalui PLUT dengan baik dan efektif tentunya didukung dengan adanya faktor yang mendukung program tersebut. Tetapi, dalam praktek nyatanya, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung antara lain adalah sebagai berikut:

# 1) Pesatnya pertumbuhan Teknologi dan Informasi

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi yang digunakan manusia juga semakin berkembang dengan pesat. Hal ini semakin terasa memudahkan banyak aktifitas termasuk usaha, salah satunya adalah kemudahan dalam mencari informasi terkini bagi para pelaku usaha dan juga media untuk promosi dan memasarkan produk.

Tetapi sayangnya pelaku UMKM di Tulungagung masih banyak yang belum mengikuti perkembangan jaman, misalnya belum mengenal internet dan belum dapat mengoperasikan media sosial, dah hal tersebut berdampak pada kualitas produksi, efektifitas produksi dan dalam pemesaran produk yang tidak bisa maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pimpinan utama PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"Penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung salah satunya adalah keterbatasan dalam teknologi dan informasi dari para pelaku UMKM. Keterbatasan termasuk pada akses pelaku usaha itu sendiri karena banyak yang belum mengenal internet dan media sosial. Padahal dari internet dan media sosial banyak yang bisa dimanfaatkan untuk dunia usaha, misalnya dalam hal promosi dan mencari informasi terkait UMKM. Kebanyakan dari mereka tidak mau belajar dan menganggap menggunakan internet atau media sosial itu ribet. Rata-rata jika kami tawarkan kepada mereka media sosial untuk wadah promosi produk mereka, mereka menjawab begini saja sudah laku. Rata -rata yang tidak ingin menggunakan internet adalah pelaku UMKM yang berada di pelosok daerah dan pelaku UMKM yang sudah sepuh (tua). Selain itu pelaku UMKM masih banyak yang bertahan dengan pengelolaan produksi usaha yang tradisional dan belum mengenal teknologi." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.12)

Dengan perkembangan teknologi dan informasi akan sangat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, selain kemudahan yang didapat proses usaha juga akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi disamping itu sumber daya manusia juga harus segera mengikuti arus globalisasi, jika tidak kemudahan dalam proses usaha tidak akan dapat dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu

Sulastri selaku pemilik usaha Batik Latar Putih yang mengatakan bahwa:

"Produk saya tidak saya promosikan lewat internet atau media sosial, karena saya lebih puas jika melayani secara langsung sendiri, dan saya belum bisa mengoperasikan media sosial. Saat ini untuk proses pengelolaan usaha saya tetap menggunakan proses yang manual saja dan ilmu dari orang tua saya, dan masalah promosi saya masih aktif mengikuti pameran atau bazar yang diadakan pemerintah maupun pihak luar pemerintah." (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2019 pada pukul 09.45 WIB).

Perkembangan teknologi dan informasi berperan penting dalam proses usaha. Karena dengan teknologi dan informasi banyak menfaat yang bisa diperoleh untuk mengembangkan usahanya. Sumber daya manusia dan pola piker yang masih kuno seharusnya di *upgrade* agar UMKM di Kabupaten Tulungagung yang tangguh dan mandiri bisa tercapai.

# b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam setiap proses kegiatan usaha. Jika sumber daya manusia yang mengelola usaha berkualitas maka usaha yang dijalankannya pasti berjalan dengan baik. Sumberdaya manusia yang berkualitas sangat diharapkan untuk mengelola UMKM di Kabupaten Tulungagung agar UMKM di Tulungagung bisa naik kelas, tangguh dan mandiri. Maka dari itu SDM perlu diberdayakan agar semakin baik dalam mengelola usaha. UMKM di Tulungagung semakin banyak yang diharapkan UMKM ini

harus terus berkembang dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat Tulungagung. Tetapi masih banyak sumber daya manusia UMKM di Kabupaten Tulungagung yang masih rendah, dampaknya adalah UMKM tidak bisa bersaing, produk UMKM tidak berkembang, kualitas produk yang tidak berkembang padahal pasar semakin hari semakin meningkatkan standar dan juga UMKM tidak dapat mengikuti perkembangan pasar dan jaman, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ysnuri selaku konsultan SDM PLUT Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

"Sumber daya UMKM di Tulungagung itu sangat banyak dan mengingat jika kondisi geografis Tulungagung yang juga beragam. Sebenarnya sumber daya manusia yang banyak itu merpakan suatu potensi bagi daerah, jika sumber daya manusia itu berkualitas. Namun jika tidak berkualitas itu malah akan menimbulkan masalah. Di Tulungagung jumlah UMKM terus bertambah namun banyak sumber daya manusia UMKM itu yang masih rendah. Hal ini berdampak pada kualitas UMKM itu sendiri yang tidak bisa berkembang. Misalnya belum mengenal internet, mengelola usaha masih dengan cara tradisional, mindset pelaku UMKM yang masih kuno dan susah diajak untuk berkembang dengan berbagai alasan. Padahal jika kita lihat produk mereka merupakan produk yang cukup bagus dan jika bisa dipasarkan secara lebih modern dan luas maka pemasukan UMKM juga semakin besar. Akibatnya UMKM yang dikelola tidak bisa berkembang." . (wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 13.55)

Diungkapkan pula oleh Ibu Marni selaku pimpinan utama
PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

"PLUT ini terkendala dalam merubah *mindset* para pelaku usaha yang rata-rata berada di pelosok dan yang sudah sepuh (tua) dan itu jumlahnya tidak sedikit. Kita berharap kedepannya bisa merubah cara berpikir mereka agar usaha

yang mereka rintis semakin berkembang dan syukur-syukur menjadi usaha yang besar. Jika UMKM di Kabupaten Tulungagung terus berkembang yang diharapkan juga untuk masyarakat sendiri khususnya para pelaku UMKM agar roda perekonomian masyarakat Tulungagung juga semakin meningkat." (wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.20)

Sumber daya manusia UMKM harus diberdayakan secara optimal agar hasil dari UMKM juga semakin baik. Pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh daerah, maka dari itu sumber daya mausia harus diperbaiki kualitasnya, salah satunya melalui pemberdayaan dari pemerintah. Sumber daya manusia UMKM yang berkualitas tentunya akan memberi dampak yang baik untuk UMKM itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat mengelola UMKM dengan baik sehingga UMKM dapat berkembang menjadi UMKM yang tangguh dan berkualitas.

# C. Analisis Data dan Pembahasan

# Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Kegiatan didunia administrasi publik adalah semua kegiatan yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan bervariatif, baik tentang pemberian pelayanan diberbagai bidang kehidupan (*Public service*), maupun yang menyangkut dengan mengejar ketertinggalan masyarakat melalui program-program pembangunan. Secara khusus,

kegiatan admibistrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Kegiatan tersebut termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat agar bisa optimal harus didukung oleh berbagai pihak. Beberapa aktor dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemerintah, LSM, swasta dan juga masyarakat terkait. Pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika semua *stakeholder* menjalankan perannya masing-masing dengan optimal.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung sebagai Lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bertugas di Kabupaten dibawah koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung bertugas untuk melayani. mendampingi dan membantu para pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung.

Hikmat (2006) yaitu pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan kekuasaan kekuatan ataupun kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya guna dalam membangun kemandirian mereka. Oleh sebab itu UMKM harus diberikan pemberdayaan agar nantinya bisa menghasilkan usaha yang tangguh dan mandiri. Disamping itu pemberdayaan itu sendiri juga

membutuhkan suatu pendampingan. Seperti yang diungkapkan oleh Suharto (2014)kegiatan pemberdayaan meliputi yaitu pendampingan. Pendampingan sangat mementukan keberhasilan dari program pemberdayaan. Pendamping sebagai perubah yang turut terlibat dalam membantu persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian pendamping ikut serta menghadapi permasalahan yang hendak diberdayakan seperti memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

# a. Pendekatan Pemberdayaan

# 1) Pemungkinan

Prinsip Dasar

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) mengenai pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan yang mengungkapkan bahwa menciptakan susasana atau iklim yang memungkinakna potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip pemungkinan dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM. PLUT sendiri telah berusaha memberikan pelayanan untuk para pelaku UMKM dengan memberikan pelayanan yang disamaratakan untuk

semua pelaku UMKM dan prosedur untuk pendampingannya tidak berlitbelit, sehingga UMKM dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung harus dilaksanakan secara merata ke setiap daerah. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar lebih berdaya guna maka dari itu PLUT juga berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat UMKM agar semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan nilai tambah. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) merupakan rumah bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, untuk berkeluh kesah ataupun mencari solusi dari permasalahan. PLUT merupakan layanan satu atap untuk para pelaku UMKM yang di sediakan oleh pemerintah.

# 2) Penguatan

# Prinsip dasar

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) mengenai pendekatan pemberdayaan yaitu penguatan yaitu sebagai berikut memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kembutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menujujung kemandirian mereka.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip penguatan dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Pendampingan pemberdayaan yang diberikan oleh PLUT yaitu dengan penguatan UMKM. Penguatan UMKM yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini PLUT menyediakan pendampingan untuk pelaku UMKM dengan mengadakan konsultasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

Sumberdaya manusia harus diberdayakan agar kualitas manusia yang mengelola UMKM bisa lebih baik lagi, memiliki pengetahuan yang banyak dan memiliki kemampuan yang lebih untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Pelatihan yang diberikan oleh PLUT sesuai dengan apa yang dikeluhkan dan apa yang dibutuhkan oleh UMKM Kabupaten Tulungagung. Pelatihan dan bimbingan ini sangat berpengaruh pada perkembangan UMKM, jika pengelola UMKM memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih unggul maka dalam mengelola UMKM pasti juga akan lebih baik. Pelatihan yang diberikan antara lain adalah terkait dengan pelatihan produksi termasuk kemasan, merek, rasa, estetika, pelatihan perizinan, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pemesaran terkait dengan promosi dan pelatihan sumberdaya manusia agar menjadi potensi yang lebih kuat untuk mengelola UMKM.

# 3) Perlindungan

# Prinsip dasar:

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) mengenai pendekatan pemberdayaan yaitu perlindungan yaitu sebagai berikut melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus dirahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip perlindungan dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Perlindungan yang diberikan berupa memberikan pelayanan yang sama kepada pelaku UMKM dan tidak membeda-bedakan. PLUT memberdayakan rakyat kecil dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di pelosok daerah Tulungagung. PLUT sangat terbuka untuk semua UMKM, misalnya masyarakat yang masih sedang ingin membuka usaha baru, PLUT juga akan membantu mengembangkan usahanya dengan segala fasilitas yang ada di dalam PLUT.

Semua layanan yang diberikan oleh PLUT juga tidak dipungut biaya, jadi pengusaha kecil tetap bisa dengan mudah mengakses PLUT Kabupaten Tulungagung. PLUT juga mengajarkan agar usaha yang telah berjalan dan usaha baru agar bekerja sama dan saling berbagi ilmu dalam setiap kesempatan. Misalnya usaha yang telah berkembang besar menjadi pembicara

untuk memberikan kiat-kiat sukses usaha dalam acara-acara pelatihan yang diadakan PLUT.

# 4) Penyongkongan

# Prinsip dasar:

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) mengenai pendekatan pemberdayaan yaitu penyongkongan yaitu sebagai berikut memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip penyongkongan dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. PLUT rutin memberikan bimbingan kepada para pelaku UMKM. Bimbingan yang diberikan dapat berupa konsultasi, pelatihan dan juga mengadakan bimbingan teknis untuk para pelaku UMKM. Bimbingan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan pngetahuan pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

PLUT juga menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa peberian pelatihan pelaku UMKM, menyediakan sarana untuk promosi misalnya galeri didalam gedung PLUT, aula untuk pelatihan dan

bimbingan teknis dan juga menyediakan jasa konsultan untuk pendampingan UMKM.

Sarana dan prasarana untuk pelatihan juga sudah tersedia di dalam gedung PLUT, terdapat ruang pelatihan atau bimbingan, ruang kreatif dan ruang konsultasi. Tak jarang PLUT juga memberikan penyuluhan pada masyarakat di pelosok-pelosok daerah Kabupaten Tulungagung hal ini membantu masyarakat yang tidak ada akses datang ke PLUT Kabupaten Tulungagung. Semua pelayanan yang diberikan oleh PLUT diusahakan bisa terjangkau oleh semua kalangan masyarakat Kabupaten Tulungagung kususnya para pelaku UMKM, agar UMKM yang sedang dirintis menjadi potensi yang besar yang di miliki Kabupaten Tulungagung agar bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat Tulungagung meningkat. Mengingat semua orang tidak kecuali bisa membuka usaha tanpa harus mempunyai gelar dari Pendidikan, hal ini merupakan peluang besar untuk masyarakat yang tidak berpendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Jika diberdayakan dengan baik SDM tersebut diharapkan dapat memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dan hasilnya memiliki usaha yang besar. Hal ini tentu saja akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Tulungagung.

# 5) Pemeliharaan

Prinsip dasar:

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) mengenai pendekatan pemberdayaan yaitu pemeliharaan yaitu sebagai berikut memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjadi keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap memperoleh kesempatan.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip pemeliharaan dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Disini PLUT memberikan pendampingan berkelanjutan untuk para pelaku usaha. Pendampingan berkelanjutan ini merupakan kegiatan untuk memelihara dan mengawasi proses berjalannya usaha. Pendampingan berkelanjutan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas UMKM. Dan juga menjaga kondisi yang kondusif dalam proses usaha. Dengan mengontrol kegiatan dan berkembangnya UMKM secara rutin pihak PLUT dapat membantu UMKM secara langsung, missal ada masalah PLUT akan segera membantu menyesesaikannya. Sumber daya manusia merupakan hal yang utama yang menentukan bagaimana UMKM berjalan, karena yang mengelola langsung UMKM adalah sumber daya manusia itu sendiri. Demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang semakin baik maka sumber daya manusia perlu diperbaiki dan terus di upgrade. Banyak para pelaku usaha di Tulungagung yang masih belum mengikuti perkembangan jaman, mindset mereka masih kuno dan belum bisa menerima arus teknologi. Hal ini dapat memperlambat dan menghambat perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung dan bisa tertinggal dari daerah lain. Makadari itu mereka memerlukan adanya perubahan, melihat kondisi yang sangat tidak mendukung.

# b. Peran Aktor dalam Pemberdayaan

# 1) Pemerintah

Prinsip dasar:

Berdasarkan tinjauan teori dari Sulistiyani (2004) terdapat aktoraktor yang berperan dalam pemberdayaan salah satunya adalah pemerintah, yang mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam pemberdayaan yaitu sebagai pembuat formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring, evaluasi serta mediasi.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip yaitu peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dari hasil penlitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah merupakan peran yang utama dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT. Dimana PLUT itu sendiri merupakan program dari Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas berdirinya

PLUT. Tujuan berdirinya PLUT di Tulungagung itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

# 2) Peran Swasta

Prinsip dasar:

Berdasarkan tinjauan teori dari Sulistiyani (2004) terdapat aktoraktor yang berperan dalam pemberdayaan salah satunya adalah swasta, yang mengungkapkan bahwa peran swasta dalam pemberdayaan yaitu sebagai kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip yaitu peran swasta dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT peran swasta dalam pemberdayaan juga dibutuhkan. Disini peran pihak swasta dalam pemberdayaan yaitu dari perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, yaitu sebagai media untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan bimbingan untuk para pelaku UMKM. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM mempunyai skill yang lebih baik dalam mengelola usaha yang dirintisnya.

# 3) Peran Msayarakat

Prinsip dasar:

BRAWIJAX

Berdasarkan tinjauan teori dari Sulistiyani (2004) terdapat aktoraktor yang berperan dalam pemberdayaan salah satunya adalah masyarakat, yang mengungkapkan bahwa peran masyarakat dalam pemberdayaan adalah ikut berpartisipasi dalam formulasi, monitoring, implementasi dan juga memberikan saran, kritik, partisipasi, menghidupkan fungsional, kontrol dan menjadi objek.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip yaitu peran masyarakat dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT masyarakat ikut berperan aktif dalam pemberdayaan sebagai objek dari Keaktifan masyarakat dalam pemberdayaan. pemberdayaan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan. Semakin banyak UMKM yang diberdayakan maka semakin banyak pula kesempatan atau peluang UMKM untuk naik kelas. Pertisipasi masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan, agar hasil dari pemberdayaan bisa diperoleh secara maksimal maka PLUT juga gencar melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung yang mengerti kegunaan dari PLUT.

# c. Tujuan Pemberdayaan

Prinsip dasar:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM, terdapat tujuan dari pemberdayaan UMKM anatara lain adalah sebagai berikut :

 Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip tersebut dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tujuan dari PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. PLUT Kabupaten Tulungagung juga memiliki tujuan untuk memberdayakan UMKM agar UMKM bisa naik kelas dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian Kabupaten Tulungagung dan pada akhirnya juga meningkatkan perekonomian secara Nasional lewat UMKM.

2) Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip tersebut dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tujuan dari

PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu meningkatkan keterjangkauan UMKM pada layanan pengembangan usaha, mendorong perkembangan jejaring layanan pengembangan usaha di daerah dan mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat jika UMKM Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan hasil yang positif dari keikutsertaannya dalam pemberdayaan PLUT. UMKM menjadi lebih mandiri dalam produksi dan banyak pengetahuan dan pelatihan yang didapatkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT.

3) Meningkatkan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Tulungagung (PLUT) telah melaksanankan prinsip tersebut dalam melakukan pemberdayaan untuk UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tujuan dari PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu memperkuat peran Pemda dalam memberdayakan UMKM didaerahnya sesuai dengan amanat PP 38/2007, mensiergikan berbagai layanan usaha dalam satu atap bagi UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dan jaringan regional atau nasional dan meningkatkan jumlah dan memperluas UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat jika UMKM yang diberdayakan oleh PLUT bisa menjadi UMKM yang lebih maju dan mandiri karena telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membantu dalam pembangunan

daerah karena UMKM juga ikut serta dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Tulungagung yang betujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

# 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Mennegah

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaannya dan tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat yang harus dihadapi.

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung menjadi faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung, yaitu antara lain sebagai berikut:

### 1) Sarana prasarana

Berdasarkan tinjauan teori dari Suharto (2014) yaitu dalam pendekatan pemberdayaan akan memberikan pemungkinan dan fasilitas dan juga memperkuat pengetahuan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya demi kemandirian mereka. Sesuai dengan teori tersebut Pusat Layanan Usaha Terpadu melakukan pemberdayaan UMKM dengan dilengkapi dengan dukungan sarana dan prasarana yaitu antara lain disediakan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu yang berlokasi strategis di pinggir jalan propinsi. Di dalam gedung PLUT sendiri tersedia berbagai sarana dan prasarana

yang menjunjang pelaksanaan pemberdayaan antara lain adalah disediakan ruang konsultasi untuk para pelaku UMKM berkonsultasi dengan konsultan dengan nyaman, ruang atau aula untuk pelatihanpelatihan atau bimbingan teknis, ruang untuk workshop, galeri untuk memamerkan dan memajang produk **UMKM** Kabupaten Tulungagung dan disediakan lima konsutan yang siap membantu pelaku **UMKM** untuk mengembangkan usaha menyelesaikan masalah.

PLUT memberikan sarana dan prasarana untuk para pelaku UMKM untuk menunjang kegiatan pemberdayaan agar lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha. Jika para pelaku usaha mendapat fasilitas yang baik maka motivasi untuk berkembang akan semakin muncul. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh PLUT dapat mempermudah melakukan pemberdayaan untuk masyarakat. Masyarakat yang diberdyakan juga mendapat fasilitas yang baik sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Hasilnya UMKM dapat naik kelas dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM.

### 2) Pasar yang luas

Suatu produk untuk dapat menjual atau memasarkan produknya diperlukan adanya sebuah pasar yang sasarannya jelas.

Dengan adanya pasar akan mempermudah proses transaksi untuk menjual hasil dari produk UMKM Kabupaten Tulungagung. Produksi UMKM Kabupaten Tulungagung semakin hari semakin terus bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung. Angka ini bertambah karena adanya permintaan yang semakin tinggi. Baik dari dalam maupun luar Kabupaten Tulungagung. Pasar semakin luas karena produk semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Promosi yang baik dan tepat akan membantu proses penjualan ke pasaran. Pendampingan pada saat promosi sangat diperlukan untuk memudahkan para pelaku usaha mendapat dan mengetahui pasar mereka. Bantuan dari orang yang lebih mengerti mengenai informasi pasar sangat diperlukan untuk proses pemasaran produk.

Konsultan pemasaran PLUT disini sangat berperan penting untuk mengembangka pasar UMKM Kabupaten Tulungagung agar lebih luas lagi. Pada prakteknya PLUT telah membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan pasarnya dengan promosi yang diberikan dengan pamera, bazar didalam maupun luar Kabupaten Tulungagung dan juga yanglebih praktis yaitu promosi melalui media sosial yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Hasilnya masyarakat semakin lebih mengenal produk UMKM Tulungagung dan pasar UMKM Tulungagung menjadi semakin luas.

Berdasarkan pendapat Suharto (2014) yaitu mengatakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan anatar berbagai kelompok dan masyarakat. Pemberdyaan harus mempu menjadi keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap masyarakat memeroleh kesempatan. Dengan memeroleh kesempatan maka peluang untuk berkembang akan semakin besar.

Keaktifan masyarakat pelaku UMKM dalam pemberdayaan sangat berpengaruh pada berjalannya pemberdayaan. Antusiasme masyarakat pelaku UMKM dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT dinilai cukup tinggi karena terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah masyarakat yang diberdayakan oleh PLUT terjadi karena pelayanan yang diberikan PLUT juga beragam dan juga jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung juga semakin bertambah banyak. Keaktifan masyarakat untuk mengikuti pemberdayaan dari PLUT merupakan hal yang baik untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung dengan begitu semakin banyak masyarakat yang memeroleh kesempatan untuk terus berkembang semakin baik.

### b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat menjadi faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung, yaitu antara lain sebagai berikut:

### 1) Pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi

Perkembangan jaman di eran globalisasi saat ini menuntut agar masyarakat mampu mengikuti arus teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau system untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu (Maryomo dan Istiana, 2006:3). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat cepat memengaruhi berbagai bidang kehidupan, hal ini menyeabkan perubahan cara kerja.

Hal tersebut bersangkutan dengan proses produksi dan pemasaran para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung. Banyak pelaku UMKM yang belum mengerti arti penting dari kemajuan jaman dan teknologi untuk perkembangan usahanya. Masih banyak pelaku UMKM yang masih kuno dan tidak mau untuk memelajari internet atau media sosial dan kemajuan teknologi untuk produksi dan promosi produk mereka, padahal

pada jaman sekarang masyarakat menyukai metode jual beli secara online, selain itu pemasaran akan lebih luas dan lebih mudah. Oleh sebab itu pelaku UMKM harus memiliki kemampuan teknologi dan informasi untuk mengikuti ketertinggalan ini.

Hal itu berdampaknya pada kualitas produksi UMKM, misalnya produksi menjadi tidak efektif dan efisien, produksi tidak bisa optimal, tidak mengikuti perkembangan jaman sehingga UMKM tertinggal. Hal tersebut akan memperlambat berkembangnya UMKM di Kabupaten Tulungagung. PLUT sebagai pendamping harus mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang tepat agar pelaku UMKM bisa dengan mudah memahami manfaat dan pentingnya internet atau teknologi untuk bejalannya usaha mereka saat ini. Hal ini akan menjadikan UMKM Kabupaten Tulungagung bisa untuk semakin berkembang, lebih mengikuti perkembangan jaman dan lebih kuat serta mandiri.

### 2) Sumber daya manusia

Dalam mengelola UMKM pasti dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten agar usaha yang dijalankan dapat terus meningkat kualitasnya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan. Dengan SDM yang berkualitas maka untuk mengelola UMKM pasti akan bisa berjalan dengan baik. Sayangnya masih banyak SDM yang mengelola UMKM yang masih tertinggal yang dikarenakan banyak faktor, misalnya adalah pelaku UMKM yang sudah

sepuh (tua), pelaku UMKM yang berada diwilayah pelosok Tulungagung, tidak ada akses untuk berkembang, tidak mau menerima perkembangan jaman dan juga tidak mau diajak untuk maju. Hal tersebut akan berdampak pada penjualan produk UMKM, produk menjadi tidak bisa mengikuti permintaan pasar dan UMKM menjadi semakin tidak bisa berkembang, Tangguh dan mandiri. Hal ini tentu saja akan menghambat proses pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT.

Sumber daya manusia harus segera di *upgrade* agar dalam mengelola UMKM dapat meningkat kualitasnya. Perkembangan jaman di era globalisasi ini tidak bisa dihindarkan, jika UMKM mau berkembang maka yang harus dilakukan juga harus mengikuti perkembangan jaman. Bermula dengan merubah sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang lebih terbuka dan paham dengan teknologi. Diharapkan UMKM akan menjadi UMKM yang tangguh dan mandiri jika SDM yang mengelola juga berkualitas.

Sejak PLUT diresmikan pada tahun 2016 banyak UMKM yang bergabung dan bekerjasama dengan PLUT untuk mengembangkan usahanya. Hal ini awalnya merupakan gagasan dari kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung. UMKM Kabupaten Tulungagung membutuhkan rumah atau wadah untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya program dari Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memberdayakan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu maka

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dab Menengah Kabupaten Tulungagung mengajukan untuk mendirikan PLUT di Kabupaten Tulungagung. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung yaitu UMKM nya yang semakin bertambah banyak.

Para pelaku UMKM dinilai harus mempunyai wadah atau rumah yang khusus menangani kebutuhan atau masalah mereka. Disinilah tugas PLUT untuk membantu para pelaku UMKM untuk berkembang semakin lebih baik. Menjadikan UMKM Kabupaten Tulungagung semakin tangguh dan mandiri dalam perkembanga jaman.

Dari pembahasan diatas mengenai Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berperan dalam pemberdayaan UMKM. Sesuai dengan yang tercantum pada misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung yaitu meningkatkan pemberdayaan UMKM. Untuk pelayanan kepada UMKM Dinas Koperasi dan UMKM menyediakan PLUT untuk media para pelaku UMKM dan para konsultan untuk kegiatan pemberdayaan.

Pelayanan yang diberikan oleh PLUT yang paling utama ada menyediakan lima konsultan untuk media berkonsultasi terkait UMKM kepada para pelaku usaha. Konsultasi bisa berupa menerima keluhan terkait usaha yang dijalankan dan permasalahan yang sedang dihadapi

UMKM. Setelah berkonsultasi konsultan akan memberikan solusi untuk setiap permasalannya. Konsultan yang tersedia ada lima konsultan yang ahli pada bidangnya, antara lain adalah konsultan produksi untuk pendampingan produksi, konsultan pembiayaan untuk pendampingan pembiayaan, konsultan kelembagaan untuk pendampingan terkait dengan kelemgaan, konsultan pemasaran untuk pendampingan bidang pemasaran dan konsultan SDM yaitu untuk pendampingan dalam bidang SDM. Didalam pemberdayaan sendiri menurut Suharto (2014) ada kegiatan pemberdayaan yaitu pendampingan. Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sebagai perubah yang turut terlibat membantu persoalan yang masyarakat sedang Dengan demikian pendamping ikut serta menghadapi permasalahan yang hendak diberdayakan seperti memecahkan masalah, menciptakan atau membuka akses bagi pemeuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh PLUT dalam memberdayakan mayarakat dengan menyediakan pendampingan yaitu para konsultan yang akan membantu memecahkan masalah UMKM.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT untuk para pelaku UMKM yatu dengan pendampingan yang dilakukan oleh para konsultan. Pendampingan tersebut antara lain adalah pendampingan dalam bidang produksi yaitu mendampingi para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk mereka dan memecahkan masalah yang terkait dengan

proses produksi. Pendampingan dalam bidang pembiayaan yaitu mendampingi para pelaku usaha dalam memanajemen pengelolaan keuangan usaha dan juga dalam hal permodalan. Pendampingan dalam bidang kelembagaan yaitu mendampingi para pelaku usaha yang terkait dengan kelembagaan misalnya untuk mengurus perizinan UMKM, pendaftaran UMKM, legalitas UMKM dan pendataan UMKM. Pendampingan dalam bidang pemasaran yaitu mendampingi para pelaku usaha ynag terkait dengan pemasaran produk misalnya adalah promosi dan juga memberikan informasi yang terkait dengan pasar. Dan yang terakhir adalah pemdampingan bidang SDM yaitu mendampingi para pelaku usaha agar SDM yang mengelola UMKM dapat lebih berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan bimbingan.

Semua permasalahan akan ditampung dan akan diberikan solusi oleh PLUT dengan berbagai cara dan akan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan permasalah lalu akan diberikan pelatihan atau bimbingan untuk memecahkan masalah guna mengembangakan UMKM.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberdyaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Peran Pusat
Layanan Usaha Terpadu di Kabupaten Tulungagung sudah cukup baik.
Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa
yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung.
Pemberdayaan UMKM yang diberikan mencakup beberapa hal, yaitu
antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Pemberdayaan

- a. PLUT memberikan pemungkinan untuk UMKM dengan memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM secara adil dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Memberikan fasilitas yang menunjang proses pemberdayaan agar potensi yang dimiliki pelaku UMKM dapat berkembang secara optimal. Prosedur pendampingan pemberdayaan yang sederhana dan tidak menyulitkan.
- b. Memberikan penguatan kepada pelaku UMKM dengan cara memberikan pelatihan, bimbingan atau pendampingan.

Pelaksanaan pendampingan UMKM yaitu dengan konsultasi. Konsultasi dilakukan oleh 5 konsultan untuk para pelaku UMKM. Antara lain adalah konsultan bidang produksi, konsultan bidang pembiayaan, konsultan bidang kelembagaan, konsultan bidang pemasaran dan konsultan bidang SDM. Para konsultan akan membantu UMKM untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

- c. PLUT memberikan perlindungan dengan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat, baik UMKM pemula maupun UMKM yang sudah berjalan lama dan tidak didominasi oleh satu kelompok saja. PLUT melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk pelaku UMKM yang berada di daerah pelosok yang tidak bisa mengakses internet maupun tidak ada akses untuk datang ke PLUT.
- d. Memberikan penyongkongan kepada pelaku UMKM dengan mengadakan pelatihan, bimbingan bimbingan dan juga menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana. Pelatihan dilakukan untuk menambah keterampilan pelaku UMKM, bimbingan-bimbingan biasanya dilakukan untuk menambah pengetahuan seputar UMKM dan sarana prasarana yang diberikan yaitu untuk menunjang proses pemberdayaan UMKM oleh PLUT.

e. PLUT melakukan pemeliharaan kepada pelaku UMKM dengan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada para pelaku UMKM. Pendampingan berkelanjutan berusaha untuk mengawasi proses berjalannya UMKM agar tetap sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) agar UMKM kualitasnya semakin meningkat.

### 2. Peran Aktor dalam Pemberdayaan

- a. Peran pemerintah merupakan peran yang utama dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT. Dimana PLUT itu sendiri merupakan program dari Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas berdirinya PLUT. Tujuan berdirinya PLUT di Tulungagung itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM.
- b. Peran pihak swasta dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT yaitu dari perusahaan yang sudah cukup besar adalah sebagai media untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan bimbingan untuk para pelaku UMKM agar UMKM memiliki skill yang lebih baik dalam mengelola usahanya.
- c. Masyarakat merupakan objek dari pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT Kabupaten Tulungagung. Peran

masyarakat sangat menentukan keberhasilan dari pemberdayaan, jika semakin banyak masyarakat yang diberdayakan maka kesempatan untuk UMKM Kabupaten Tulungagung untuk naik kelas juga akan semakin terbuka lebar.

### 3. Tujuan Pemberdayaan

- a. PLUT Kabupaten Tulungagung berusaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu UMKM kabupaten Tulungagung dengan memberdayakan UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung dan juga ikut serta dalam peningkatan perekonomian Nasional lewat UMKM.
- b. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT cukup membantu dalam proses kegiatan usaha para pelaku UMKM. Banyak manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan pemberdayaan yang dilakukan oleh PLUT, misalnya adalah pendampingan, pelatihan usaha, bimbingan teknis dan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan pemberdayaan UMKM kabupaten Tulungagung.
- c. Tujuan pemberdayaan PLUT Kabupaten Tulungagung yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan melalui UMKM

- 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT Kabupaten Tulungagung, antara lain sebagai berikut:
  - a. Faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjuang proses pemberdayaan UMKM, seperti tersedianya gedung PLUT yang berada di tempat yang strategis. Didalam gedung PLUT juga difasilitasi dengan galeri untuk memajang produk UMKM, ruang untuk pelatihan, ruang kreatif dan ruang untuk konsultasi dan juga tersedia konsultan yang siap membantu memberdayakan para pelaku UMKM. Pasar yang luas, ini dikarenakan produksi UMKM yang semakin banyak, dan juga minat konsumen terhadap produk juga semakin banyak dan luas. Hal didukung dengan promosipromosi yang telah dilakukan sebelumnya. Keaktifan masyarakat untuk mengikuti pemberdayaan juga semakin besar. Ini sangat membantu proses pemberdayaan, semakin banyak UMKM yang diberdayakan maka semakin banyak pula UMKM yang bepeluang lebih untuk naik kelas, dan diharapkan bisa menjadi UMKM yang lebih tangguh dan mandiri.

b. Faktor penghambatnya yaitu pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM di Tulungagung banyak yang belum bisa menggunkan teknologi untuk mengembangkan usahanya, dan susah untuk diajak mengikuti perkembangan jaman. Hal ini banyak terjadi karena pelaku UMKM banyak yang sudah sepuh (tua) dan UMKM yang berada didaerah pelosok. Hal ini menghambat UMKM untuk bisa berkembang karena semakin tertinggal oleh UMKM yang terus berinovasi. Sumber daya manusia merupakan sebuah potensi tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi permasalahan. SDM pelaku UMKM masih banyak yang belum dapat mengikuti perkembangan jaman, hal ini dapat menghambat proses pemberdayaan karena pada era globalisasi ini teknologi dan informasi dapat mempermudah jalannya UMKM, akan sangat disayangkan jika SDM nya tidak dapat menggunakan teknologi dan informasi untuk mengembangkan usahanya, akibatnya UMKM menjadi tertinggal dan tidak bisa berkembang.

### B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih gencar mengenalkan PLUT kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada di pelosok daerah. Seharusnya PLUT lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui keberadaan serta fungsi berdirinya PLUT Kabupaten Tulungagung, sehingga para pelaku UMKM dapat memanfaatkan secara optimal adanya PLUT dalam meningkatkan kualitas produknya.
- 2. Diperlukan strategi yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas produk UMKM di Kabupaten Tulungagung, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan UMKM Kabupaten Tulungagung dapat naik kelas.
- 3.Pengelola PLUT harus meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki, sehingga dapat membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.
- 4. Lebih memfokuskan pemberdayaan untuk pelaku UMKM yang lebih membutuhkan bantuan agar UMKM dapat lebih maju dan tidak tertinggal oleh UMKM lainnya. Pihak PLUT harus lebih aktif mencari pelaku UMKM yang membutuhkan penanganan untuk memajukan usahanya.
- PLUT seharusnya memperbaiki dan lebih rutin dalam menyelenggarakan promosi untuk produk UMKM Kabupaten Tulungagung dengan memperbaiki tatanan didalam galeri PLUT dan

BRAWIJAY

- rutin menyelenggarakan pameran atau bazar agar UMKM binaan PLUT semakin dikenal masyarakat.
- 6. Untuk faktor pendukung bisa lebih untuk ditingkatkan lagi potensinya agar lebih bisa dirasakan manfaatnya, karena berhubungan dengan keberhasilan pemberdayaan UMKM, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menaikkan kelas UMKM Kabupaten Tulungagung dan mampu mengatasi apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT.
- 7. Untuk faktor penghambat pemberdayaan UMKM, PLUT dapat menambah tenaga penyuluh ke semua daerah di Kabupaten Tulungagung, sehingga pelaku UMKM yang kesulitan akses teknologi dan informasi secara perlahan dengan diberikan bimbingan yang sesuai bisa mengikuti arus perkembangan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengembangkan SDM UMKM Kabupaten Tulungagung, PLUT dapat dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku usaha lebih rutin dan khususnya untuk para pelaku UMKM yang butuh diberdayakan.

# BRAWIJAY

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Achmadi dan Cholid, Narbuko. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, Nana Abdul. 2019. *Administrasi Pembangunan Teori dan Implementasi*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung tahun 2018
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo . 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakatra: PT. Elex Media Komputindo
- Hikmat, Hary. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Strategi Dan Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFEYYogyakarta.
- Kementrian Koperasi dan UKM. 2005. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Surabaya
- Kementrian Koperasi dan UKM. 2016. Pedoman Pendampingan Koperasi dan UMKM melalui Pusat Layana Usaha Terpadu. Surabaya
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta
- Maryono, Y. dan B. Patmi Istiana. 2006. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yudhistira
- Miles, M.B. Hubarman, A.M. dan Saldana. J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3.USA: Sage Publications
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulia, Prima. 2016. *Kinerja Ekspor UMKM Jatim Terkendala Merek dan Kemasan* [Internet]. [diunduh 27 Januari 2019)]. Tersedia pada https://bisnis-tempo.co/read/793042/kinerja-ekspor-umkm-jatim-terkendala-merek-dan-kemasan
- Pawestri, Noristera. 2015. *Kualitas Produk Jadi Kendala UMKM Untuk Berkembang* [Internet]. [diunduh 27 Januari 2019]. Tersedia pada http://jogja.tribunnews.com/2015/12/20/kualitas-produk-jadi-kendala-pelaku-umkm-untuk-berkembang
- Pedoman Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM dan profil produk unggulan Tulungagung. 2016. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tulungagung
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.KUKM./I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016
- Saiman, Leonardus. 2009. *Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-Kasus.*Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang.P . 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.P. 2014. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang.P. 1994. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung
- Antyanto, Ikhwan Nur. 2012. *Kabupaten Tulungagung* [Internet]. [diunduh 27 Januari 2019]. Tersedia pada https://www.slideshare.net/mobile/ikhwanNurAntyanto/kabupatentulungagung
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakatra: LP3S
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta

- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



# BRAWIJAY

### CURRICULUM VITAE

Nama : Tevi Ana Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : 155030107111046

Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung. 08 November 1996

Pendidikan : 1. SDN Kampungdalem 1, Tamat Tahun 2009

2. SMPN 1 Tulungagung, Tamat Tahun 20123. SMAN 1 Kedungwaru, Tamat Tahun 2015

Magang : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Motto : Bukan Bahagia yang membuatmu bersyukur tetapi

bersyukur yang membuatmu bahagia

### Lampiran Pedoman Wawancara

### Kepada Pusat Layanan Usaha Terpadu

- 1. Bagaimanaawalmunculnya PLUT di Tulungagung?
- 2. Apaalasanterpentingmunculnya PLUT di Tulungagung?
- 3. ApasajajenispemberdayaanUMKM yang digunakan PLUT?
- 4, Bagaimana strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan PLUT?
- 5. Bagaimana pendampingan UMKM yangdilakukan oleh PLUT?
- 5. Apa saja pendekatan pemberdayaan UMKM yang digunakan PLUT?
- 6. Siapas aja aktor yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan PLUT?
- 7. Apakahadadampakdarikeberadaan PLUT?
- 8. Apa dasar hukum dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan PLUT?
- 9. Apakah ada hambatan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT?
- 10. Bagaimana upaya PLUT dalam mengatasi persoalan hambatan tersebut?
- 11. Apakah ada dukungan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PLUT?
- 12. Bagaimana penguatan kapasitas UMKM yang dilakukan oleh PLUT?
- 13. Bagaimana prosedur bagi pelaku UMKM untuk bekerjasama dengan PLUT?
- 14. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh PLUT kepada para pelaku UMKM?
- 15. Apa harapan pemerintah Kab. Tulungagungdenganadanya PLUT di Tulungagung?
- 16. Bagaimana upaya DinasKoperasi dan UMKM dalam mensosialisasikan keberadaan PLUT kepadamasyarakat?
- 17. Bagaimana selama ini keaktifan masyarakatpelaku UMKM dalam keikutsertaan PLUT?

### Kepada masyarakat pelaku UMKM di KabupatenTulungagung:

- 1. Sejak kapan usaha bapak/ibu ini dirintis?
- 2. Apa yang mendorong bapak/ibu bekerjasama dengan PLUT?
- 3. Apa saja produk dari usaha bapak/ibu ini?
- 4. Darimana bapak/ibu mengetahui informasi terkait dengan PLUT?
- 5. Apakah PLUT memberikan dampak positif kepada bapak/ibu dalam mengembangkan usaha bapak/ibu?
- 6. Apa saja yang bapak/ibu dapatkan setelah mendapatkan pendampingan dari PLUT?
- 7. Apakah keberadaan PLUT berpengaruh pada hasil penjualan usaha bapak/ibu?
- 8. Bagaimana alur untuk dapat bekerjasama dengan PLUT?
- 9. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan oleh PLUT kepadabapak/ibu?
- 10. Mengapa bapak/ibu tertarik berkerjasama dengan PLUT?

# BRAWIJAYA

## Wawancara dengan pelaku UMKM binaan PLUT Kabupaten Tulungagung



Dokumentasi dengan Pimpinan PLUT dan Konsultan PLUT kabupaten Tulungagung



## Dokumentasi galeri PLUT kabupaten Tulungagung

